

SERANGAN HOAX TERHADAP KPU PADA PEMILU SERENTAK 2019 Studi di Jawa Tengah

Tim Peneliti :
Muhammad Mahsun, M.A
Solkhah Mufrikhah, M.Si



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAWA TENGAH 2019**

Laporan Penelitian Kepemiluan

**Serangan Hoax Terhadap KPU Pada Pemilu
Serentak 2019: Studi di Jawa Tengah**



Tim Peneliti:
Muhammad Mahsun, M.A
Solkhah Mufrikhah, M.Si

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAWA TENGAH
2019**

*Serangan Hoax Terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019:
Studi di Jawa Tengah*

KATA PENGANTAR

Studi tentang hoax di Indonesia adalah studi yang penting dilakukan, terutama fenomena penyebarannya di Pemilu 2019. Hoax di Pemilu 2019 tidak saja diproduksi dan disebarakan untuk menyerang dan menjatuhkan para kandidat presiden dan wakil presiden yang berkontestasi, namun hoax juga ditujukan pada penyelenggara pemilu. Karena itu, di pemilu 2019 eksistensi hoax tidak saja mengganggu proses kampanye para kandidat yang sedang berkontestasi, namun juga mengganggu penyelenggara pemilu dan pelaksanaan tahapan pemilu.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa hoax juga memiliki dampak panjang dan besar secara sosial dan politik. Pertama, secara sosial, hoax menyumbang dalam membentuk polarisasi masyarakat Indonesia yang semakin tajam di Pemilu 2019. Ini mengganggu tatanan sosial, kerukungan masyarakat, dan menciptakan konflik horizontal di antara kelompok masyarakat, bahkan sampai pada praktik persekusi. Kedua, secara politik, hoax dapat mengganggu proses demokratisasi yang sedang berjalan lambat di Indonesia. Hoax, apalagi ketika disandingkan dengan hasutan kebencian, memiliki dampak pada disrupsi proses pemilihan presiden-wakil presiden dan wakil-wakil rakyat di parlemen. Pemilu yang seyogyanya dilaksanakan untuk menyediakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat dan sirkulasi elit dengan cara demokratis, akan menjauh dari

idealitas tujuan yang hendak dicapai ketika dipenuhi oleh penggunaan hoax sebagai instrument merebut kekuasaan. Ini dikarenakan hoax layaknya virus yang tidak saja dapat memecah belah persatuan anak bangsa, tetapi juga dapat mempengaruhi dan menggiring preferensi publik. Yang dikhawatirkan dari ini adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin politik yang tidak memiliki integritas dan visi transformatif, serta tidak memiliki keberpihakan pada rakyat dan visi demokratis.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh KPU Jawa Tengah dan Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, dalam rangka mengungkap problem dan akar masalah di balik masifnya benyebaran hoax di Pemilu 2019, khususnya hoax-hoax yang diproduksi dan disebarkan untuk menyerang penyelenggara pemilu. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan para stakeholder dalam menyusun kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan fenomena hoax yang mungkin akan terjadi pada perhelatan Pemilu dan Pilkada kedepan di Indonesia.

Terkait dengan terlaksananya penelitian ini, tentu banyak dibantu oleh banyak kalangan, baik institusi maupun perorangan. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan-bantuan itu, baik berupa dana penelitian maupun sumbangsih ide, gagasan, waktu, dan yang lainnya. Pertama, ucapan terimakasih kami ucapkan kepada KPU Jawa Tengah yang telah memberikan support

dana penelitian dan berbagai fasilitasnya. Terkhusus ucapan terimakasih disampaikan kepada para komisioner dan para staff yang ada di dalamnya. Kedua, ucapan terimakasih disampaikan kepada pimpinan FISIP UIN Walisongo, yang berkenan memberikan dukungan dan fasilitas gedung untuk pelaksanaan rangkaian FGD dan diseminasi hasil riset ini. Ketiga, ucapan terimakasih kami sampaikan pada kolega dosen yang ada di FISIP atas sumbangsih ide dan gagasan untuk menyempurnakan penulisan hasil riset ini. Keempat, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada para narasumber yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari Mafindo, KPU di wilayah Jateng, Kominfo Jateng, Jurnalis, akademisi dari Undip, Maswijayanto, dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan di sini satu per satu.

Terakhir, penelitian ini tentu masih ada kekurangannya dan keterbatasannya. Karena itu, riset dan diskusi terbuka masih perlu dilakukan oleh para sarjana lain untuk melengkapi dan menyempurnakan temuan-temuan dari penelitian ini. Namun demikian, kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan berarti tidak saja bagi pengembangan keilmuan terkait masalah kepemiluan di Indonesia, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan. Wallahu a'lam bisowaf.

Semarang, 28 Nopember 2019

Tim Peneliti

[5]

*Serangan Hoax Terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019:
Studi di Jawa Tengah*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
BAB 1	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	19
BAB 2	21
LANDASAN TEORI	21
A. Hoaks: Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi	21
B. Hipotesis Penelitian	30
BAB 3	33
METODE KAJIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pengumpulan Data.....	35
C. Teknik Analisis Data	39
BAB 4	43
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Internet dan Penyebaran Hoax di Indonesia	43

B.	Serangan Hoax pada KPU di Pemilu 2019.....	63
B.1	Hoax Terkait Rekayasa Kecurangan oleh KPU.....	65
B.2	Hoax Terkait Server KPU.....	73
B.3	Hoax Terkait Logistik Surat Suara.....	78
B.4	Hoax Terkait DPT.....	89
B.5	Hoaks Terkait Pemungutan Suara.....	96
B.6	Hoax Ancaman Pada Komisioner dan Tuduhan Ketidaknetralan KPU.....	109
C.	Motif dan Faktor Penyebab Masifnya Penyebaran Hoax 125	
C.1	Motif Produksi dan Penyebaran Hoax Secara Umum..	125
C.2	Motif Penyebaran Hoax untuk Menyerang KPU.....	130
C.3	Faktor-Faktor Penyebab Masifnya Penyebaran Hoax .	133
D.	Dampak Serangan Hoax pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Jawa Tengah.....	138
E.	Strategi KPU dalam Menghadapi Serangan Hoax pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah.....	142
BAB V	145
PENUTUP	145

*Serangan Hoax Terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019:
Studi di Jawa Tengah*

A. Kesimpulan.....	145
B. Rekomendasi Kebijakan.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149
BIODATA PENULIS.....	155

*Serangan Hoax Terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019:
Studi di Jawa Tengah*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses demokratisasi di Indonesia sudah berjalan selama dua dekade, dan tidak sedikit problem yang menyertainya. Salah satu problem yang berkembang pada beberapa tahun terakhir adalah merebaknya penyebaran konten hoaks dalam penyelenggaraan politik elektoral (Pilkada dan Pemilu). Penyebaran konten hoax ini secara masif terjadi berbarengan dengan adanya kemajuan teknologi internet dan komunikasi melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. dan aplikasi chatting WhatsApp. Keberadaan media sosial itu telah memberikan ruang bagi penyebaran dan pertukaran informasi dengan cepat yang melintasi ruang dan waktu. Sosial media juga memungkinkan konten sebuah informasi atau opini dapat mudah viral, meski belum jelas validitas dan akurasi kebenarannya, sehingga memiliki kemungkinan mengandung hoax. Kondisi ini dengan cepat juga berdampak pada perkembangan dinamika politik dalam suatu negara, khususnya dalam ruang politik elektoral.

Fenomena di atas oleh komunitas internasional disebut sebagai era *post-truth*, dimana batas antara kejujuran dan ketidakjujuran, kebenaran dan kebohongan, fiksi dan non-

fiksi tidak lagi jelas disparitasnya. Di era post-truth, opini publik sering kali dibangun tanpa memperhatikan objektivitas fakta-fakta yang terkandung dalam informasi yang disebar. Justru, informasi yang mengandung konten hoax yang dinilai dapat membangkitkan emosi dan keyakinan personal masyarakat akan mudah tersebar, dan tidak jarang pula dijadikan sebagai salah satu instrumen utama untuk mendapatkan jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilu di banyak negara demokrasi. Tidak sedikit cara ini bekerja dan mempengaruhi keberhasilan sejumlah politisi.

Bekerjanya hoaks mempengaruhi opini dan preferensi publik atas pilihan politik tidak dapat dilepaskan dengan kondisi dimana era *post-truth* telah menciptakan masyarakat (secara umum) tidak lagi perlu untuk mengecek kembali segala informasi yang tersebar atau disebar dalam ruang publik virtual. Dapat dikatakan *post-truth* adalah era dimana ketika publik tidak lagi berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh apakah berita atau informasi yang diterima sesuai dengan fakta atau mis-informasi, alias hoax. Ini juga tidak dapat dilepaskan dari era dimana informasi atau berita yang cukup mudah didapatkan dan diakses dengan cara yang cukup mudah dan cepat melalui internet (Salam 2018: 315).

Di era *post-truth*, penyebaran konten hoax melalui jaringan internet atau media sosial umumnya ditujukan untuk menyerang kandidat dalam kontestasi pemilu. Ini, secara global, mulai massif terjadi sejak pemilihan presiden

Amerika Serikat pada 2016 dengan terpilihnya Donal Trump dari Partai Republik (Allcot & Gentzkow 2017; Monsees 2018). Sedangkan di Indonesia sendiri, penyebaran konten hoax untuk kepentingan politik kekuasaan dimulai pada Pilpres 2014 (Salam 2018), dan ekskalasinya semakin tinggi selama proses Pilkada DKI Jakarta 2017 (Utami 2018: 86). Berdasarkan survey MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) dengan menggunakan 1.116 responden menemukan bahwa penyebaran konten *hoax* cukup tinggi terjadi pada sepuluh hari sebelum putaran pertama Pilkada DKI. Dimana sebanyak 44,3 persen responden menyatakan menerima konten hoax di setiap hari dan 17.2 persen dari mereka menerima lebih dari satu konten hoax per harinya. Selain itu, hasil survey juga menunjukkan bahwa terdapat 91,8 persen konten hoax yang diterima mengandung muatan topik sosial politik berkaitan dengan Pilkada DKI, serta 88,6 persen mengandung isu-isu rasial atau SARA (MASTEL 2017: 18).

Di Indonesia penyebaran konten *hoax* untuk menyerang kandidat dan/atau mempengaruhi opini publik juga massif terjadi pada masa penyelenggaraan Pemilu Serentak yang diadakan pada 17 April 2019. Berdasarkan informasi yang diliput media masa JawaPos.Com menunjukkan bahwa terdapat 9 juta masyarakat Indonesia yang terpedaya konten *hoax* pada momentum Pemilu 2019, khususnya pada masa-masa menjelang hari pencoblosan pada 17 April 2019 (Ramadan 2019). Media sosial (seperti

Facebook dan Twitter) dan aplikasi *chatting* seperti WhatsApp adalah diantara saluran utama yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan konten *hoax* di masa Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan hasil survey MASTEL terhadap 941 responden yang dilakukan dari tanggal 1 s/d 15 Maret 2019 ditemukan bahwa 87,50 persen konten *hoax* disebarikan melalui media sosial, dan 67 persen disebarikan melalui aplikasi *chatting*. Hasil survey juga menemukan bahwa terdapat 34,60 persen responden yang menyatakan menerima konten *hoax* setiap harinya, dan 14,70 persen menerima konten *hoax* lebih dari satu kali dalam satu hari (MASTEL 2019).

Dari penelusuran penulis, menemukan bahwa penyebaran konten *hoax* di masa pemilu 2019, baik sebelum masa pencoblosan maupun setelahnya, tidak saja ditujukan untuk menyerang kandidat, namun juga menyerang penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berkaitan dengan ini, Komisioner KPU, Viryan Aziz, dalam diskusi berjudul “Hitung Mundur Pemilu 2019” di FX Sudirman pada 12 April 2019, mengatakan bahwa terdapat 7 konten *hoax* yang menyebar dan menghebohkan publik. Diantara konten *hoax* itu adalah, seperti: adanya dugaan DPT ganda, terdapat 31 juta data siluman masuk ke DPT KPU, 14 juta orang gila masuk dalam DPT, ditemukan 7 kontainer berisi 70 juta surat suara, server KPU telah disetting dari Singapura dimana 57 persen suara untuk

memenangkan paslon tertentu, dan lain sebagainya (Ayu 2019).

Dari data yang ada juga menemukan bahwa eskalasi penyebaran konten hoax meningkat pasca hari pemungutan suara 17 April 2019 berlangsung. Salah satunya, seperti data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), bahwa mesin Pengais milik Kemenkominfo, atau yang dikenal dengan Ais, mendeteksi ada 64 konten hoax terkait pelaksanaan pemilu 2019 yang beredar dalam kurun 3 hari, yaitu 18 – 20 April 2019. Diantara konten hoax tersebut seperti: data di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) yang mengatakan bahwa formulir C1 yang didokumentasikan dikirim ke pusat data Mabes TNI oleh para Babinsa-Koramil. Kabar yang beredar adalah formulir C1 yang didokumentasika adalah pasangan 02 disebut-sebut memperoleh suara hingga 60 persen (Widyastuti 2019).

Masifnya penyebaran konten hoax dalam proses politik elektoral di Indonesia, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sebagaimana dijelaskan di atas, perlu mendapatkan perhatian serius baik dari penyelenggara pemilu maupun akademisi, karena fenomena ini dapat menjadi problem serius bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia kedepan. Penyebaran konten hoax di masa pemilu tidak saja dapat menggiring opini publik pada pilihan politik yang salah, memicu konflik horizontal, tindakan kekerasan (persekusi), mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilu,

dan menggoyah bangunan kebangsaan Indonesia (*nation state*), namun juga dapat membangun ketidakpercayaan (*distrust*) publik pada institusi demokrasi di Indonesia yang baru memasuki tahap proses konsolidasi.

Berkaitan dengan masalah di atas, KPU Jawa Tengah dan Tim Peneliti dari Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Walisongo Semarang, telah melakukan riset untuk mengkaji lebih dalam akar masalah di balik masifnya penyebaran konten hoax yang berlangsung di masa-masa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), presiden dan wakil presiden. Meskipun penyebaran isu hoax adalah isu nasional, secara khusus, riset ini dilakukan dalam konteks lokal, yaitu lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pilihan wilayah Jawa Tengah sebagai lokasi riset didasarkan pada maraknya fenomena penyebaran konten hoax yang relatif besar pada Pilkada 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Secara khusus, riset ini difokuskan untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk, jenis dan makna konten hoax yang secara umum disebarkan di Pemilu 2019, dan secara khusus diproduksi dan disebarkan untuk menyerang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019; sejauh mana serangan *hoax* mempengaruhi persiapan tahapan Pemilu Serentak 2019 di Jawa Tengah; dan strategi apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini

KPU, di Jawa Tengah untuk menangani serangan *hoax* tersebut.

Ini adalah salah satu riset kepemiluan yang sangat penting, karena memiliki tujuan utama untuk mengungkap akar masalah di balik masifnya penyebaran *hoax* guna mencari solusi atau jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan salah satu problem serius yang ada dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia tersebut. Harapannya, penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilih di pemilu Indonesia kedepan dapat berjalan sesuai idealitas yang diimajinasikan. Dimana sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil, jujur, dan jauh dari proses-proses non-demokratis dapat terlaksana, khususnya terhindar dari pengaruh konten-konten *hoax* yang dapat melencengkan agenda utama demokrasi elektoral di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, riset ini akan dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan utama berikut:

- 1) Mengapa penyebaran konten hoaks masif terjadi pada masa-masa Pemilu di Indonesia dalam satu dekade terakhir?
- 2) Bagaimana bentuk dan motif konten *hoax* secara umum yang disebarkan di di Indonesia dan secara khusus ditujukan untuk menyerang KPU di Pemilu 2019?

- 3) Sejauh mana serangan *hoax* tersebut mempengaruhi tahapan Pemilu Serentak 2019 di wilayah Jawa Tengah?
- 4) Strategi apa saja yang telah dilakukan oleh KPU di wilayah Jawa Tengah untuk menangani serangan *hoax* dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019?

C. Tujuan Penelitian

Riset ini dilakukan untuk beberapa tujuan penting berikut:

- 1) Mengidentifikasi bentuk/jenis dan isu *hoax* secara umum yang disebarkan di Pemilu 2019;
- 2) Mengidentifikasi bentuk dan jenis konten *hoax* yang disebarkan untuk menyerang KPU pada Pemilu 2019;
- 3) Menemukan akar masalah atas merebaknya konten *hoax* yang ditujukan untuk menyerang KPU di Pemilu 2019;
- 4) Membuat *policy brief* yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan publik dalam rangka memperbaiki manajemen pemilu dan meminimalisir penyebaran *hoax* pada penyelenggaraan pemilu kedepan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil riset berguna membantu dalam memahami akar permasalahan terkait dengan merebaknya penyebaran konten hoaks di Pemilu Serentak 2019;
- 2) Hasil penelitian bermanfaat untuk menyumbang produksi pengetahuan dalam diskursus tentang kepemiluan atau politik elektoral;
- 3) Hasil riset dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membuat rekomendasi kebijakan dalam manajemen Pemilu, khususnya menyelesaikan permasalahan penyebaran konten *hoax* yang ada dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia kedepan.

*Serangan Hoax Terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019:
Studi di Jawa Tengah*

BAB 2 LANDASAN TEORI

A. Hoaks: Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi

Diskusi tentang *hoax*, pada dasarnya, bukan sesuatu yang baru. Penyebaran informasi yang mengandung konten *hoax* sudah ada sejak 17 abad lalu, yang dilakukan dalam wilayah akademik, ilmu pengetahuan, agama, mitologi, humor, legenda, dan seterusnya (MacDougall 1958). Namun, dalam waktu yang lama isu ini tidak menjadi perhatian serius oleh publik. Kemudian, pada tahun-tahun terakhir *hoax* kembali menjadi isu global yang menarik perhatian publik, khususnya berkaitan dengan penyebarannya dalam konteks politik elektoral (Pemilu/Pilkada), yang mengikuti kemajuan internet, media sosial, dan aplikasi *chatting*.

Secara umum, *hoax* didefinisikan sebagai informasi bohong yang dibuat dengan sengaja dan terencana untuk menyamarkan suatu kebenaran. Ini sebagaimana definisi yang diberikan oleh MacDougall (1958: vi) bahwa hoaks adalah “*deliberately concocted untruth made to masquerade truth*”, atau “informasi tidak benar yang sengaja dibuat untuk menyamarkan kebenaran.” Lebih lanjut *hoax* menurutnya adalah informasi yang tidak memiliki basis kebenaran atas fakta. Singkatnya, *hoax* adalah informasi yang tersebar dan

tidak mengandung kebenaran. Dari sini jelas bahwa definisi hoaks ditekankan pada adanya ketidakbenaran (*untruth*). Pandangan lain tentang *hoax* dimaknai sebagai “*false information designed to influence or provoke an audience into acting in accordance with the interests of the creator and circulated through social media*”, atau “informasi bohong yang didesain untuk mempengaruhi atau memprovokasi publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan sang pembuat dan menyebarkan informasi bohong tersebut melalui media sosial” (Kusman’s 2017: 6).

Sarjana lain mencoba membuat pembedaan antara hoaks dan misinformasi. Dimana hoaks dimaknai sebagai informasi yang bertentangan dengan sebuah fakta dan tidak memiliki basis kebenaran di dalamnya. Sebagai contoh, sikap paranoid terhadap munculnya PKI (Partai Komunis Indonesia) dibawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Berita ini dikategorikan sebagai hoaks sejauh tidak memiliki fakta yang dapat menjadi variabel pendukung atas informasi tersebut. Sedangkan misinformasi adalah informasi yang memungkinkan didalamnya ada beberapa atau sedikit kebenaran tetapi telah dimodifikasi atau dibesar-besarkan (Nadzir, Sefiani & Permana 2019; Allcott & Gentzkow 2017; Bergmann 2018; Kuklinski at al. 2000). Sebagai contoh adalah informasi yang beredar di masa Pemilu, khususnya mendekati hari pemungutan suara 17 April 2019, bahwa diperbolehkannya menggunakan kartu identitas E-KTP untuk memberikan suara (mencoblos) di TPS mana pun

meski tidak sesuai alamat yang tertera di E-KTP pemilih. Menurut penulis informasi ini masuk dalam kategori misinformasi jika menggunakan definisi tersebut di atas, karena di dalamnya ada sedikit kebenaran, namun telah dimanipulasi. Dimana informasi yang benar adalah diperbolehkan menggunakan E-KTP bagi warga yang tidak memiliki kartu formulis C6 (Undangan Memilih) untuk memberikan suaranya pada waktu pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera E-KTP tersebut.

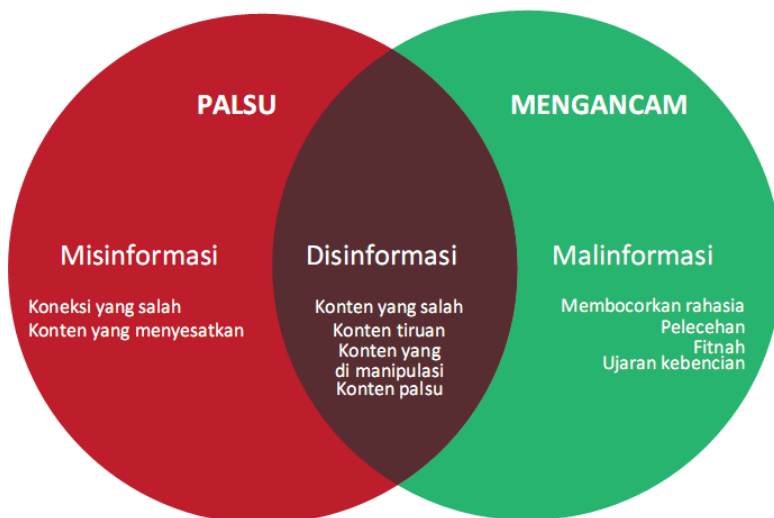
Selain pemaknaan hoaks di atas, definisi hoaks yang lebih komprehensif diberikan oleh Ihsan Ali-Fauzi, dkk. dalam sebuah buku mini berjudul “Melawan Hasutan Kebencian” yang diterbitkan oleh PUSAD Paramadina dan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) pada 2019. Dalam buku ini hoaks didefinisikan sebagai informasi yang direayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi dengan tujuan membuat pesan yang benar tidak dapat diterima oleh seorang yang menerima pesan tersebut. Menariknya, mereka juga mengkaitkan definisi hoaks dengan hasutan kebencian. Dua hal ini saling berkaitan, karena sering kali hasutan kebencian tidak saja dilakukan dengan cara provokasi terang-terangan, namun juga dengan menyebarkan informasi yang mengandung konten hoaks (Ali-Fauzi, dkk., 2019: 2).

Berbeda dengan para sarjana sebelumnya yang membedakan antara hoaks dan misinformasi, Ali-Fauzi, dkk.

(2019) justru memasukkan misinformasi bagian dari hoaks itu sendiri. Menurut hoaks merupakan bagian dari kekacauan informasi yang didalamnya mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi (lihat Gambar 1). Definisi yang dikembangkan oleh Ali-Fauzi, dkk. ini yang dijadikan sebagai kerangka pikir dalam penelitian tentang serang *hoax* terhadap KPU di Pemilu Serentak 2019 ini. Berikut di bawah ini penjelasan lebih detailnya.

Misinformasi adalah informasi yang tidak mengandung kebenaran didalamnya, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Contohnya adalah informasi yang salah tentang kesehatan dan penculikan anak. Seringkali informasi seperti ini disebar tanpa ada verifikasi dari ahli atau pihak yang berwenang dan disebar justru dengan maksud yang baik, supaya orang lain tidak mendapat masalah atau terlibat dalam bahaya. Sedangkan disinformasi merupakan informasi yang tidak ada kebenaran didalamnya karena tidak sesuai dengan fakta atau realitas, dan orang yang menyebarkannya juga tahu kalau itu tidak benar. Informasi ini merupakan kebohongan yang sengaja diproduksi, disebar untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain (Ali-Fauzi, dkk., 2019: 7-8).

Gambar 1. Perbedaan Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi



Sumber: Ali-Fauzi, dkk. (2019: 8)

Adapun malinformasi adalah informasi yang benar namun digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. Atau dengan kata lain, informasi ini adalah sejenis hasutan kebencian. Misalnya, hasutan kebencian terhadap kelompok minoritas agama atau orientasi seksual tertentu (Ali-Fauzi, dkk., 2019: 7-8).

Lebih lanjut, Ali-Fauzi, dkk. juga membagi ragam jenis dari informasi yang mengandung konten hoaks, khususnya yang masuk dalam kategori misinformasi dan

disinformasi. Secara teoritik, sangat memungkinkan dalam sebuah informasi yang mengandung konten hoaks didalamnya terdapat lebih dari satu jenis misinformasi dan disinformasi guna membuat target penerima informasi lebih yakin. Setidaknya terdapat tujuh misinformasi dan disinformasi yang dapat diidentifikasi dari kategorisasi yang dilakukan oleh FirstDraft. Ini sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Tujuh Kategori Misinformasi dan Disinformasi



Sumber: Ali-Fauzi, dkk. (2019: 9)

Dari ketujuh bentuk misinformasi dan disinformasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, informasi

dalam bentuk satire dan parodi, yang dipahami sebagai sindiran yang ditunjukkan kepada seseorang atau peristiwa tertentu. Satire dan parody biasanya dibungkus dalam konteks humor. Namun, karena acap kali konteks dibali produksi satire dan parody tidak dipahami oleh seseorang yang menerimanya, maka ini memiliki kemungkinan besar untuk menimbulkan misinformasi. *Kedua*, informasi dalam bentuk konten yang menyesatkan. Ini dapat dalam bentuk informasi yang mana kontennya bisa berupa potongan-potongan gambar yang disatukan, ayat-ayat suci yang digunakan secara sepotong-potong, dan berita-berita yang dipelintir. Konten menyesatkan seperti ini banyak ditemukan dalam iklan-iklan politik dan propaganda, dimana biasanya pengguna atau penerima informasi digiring untuk memiliki persepsi tertentu tentang sebuah isu atau peristiwa yang sengaja diframing (Ali-Fauzi, dkk., 2019).

Ketiga, informasi dalam bentuk konten tiruan. Infomarsi ini dibuat secara sengaja dan dibuat agar seolah-olah berasal dari seseorang atau lembaga yang nah namun sesungguhnya palsu. Informasi dengan konten tiruan ini lazimnya mudah dan cepat dipercayai, serta tidak diteliti terlebih dahulu oleh orang yang menerima. *Keempat*, informasi dalam bentuk konten palsu, yaitu informasi yang didalamnya sama sekali tidak mengandung kebenaran dan 100 persen dengan sengaja dibuat dan diproduksi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menipu dan merugikan pihak lain. *Kelima*, informasi dalam

bentuk koneksi yang salah, yaitu informasi yang mana ketika relasi antar elemen didalamnya tidak saling mendukung. Elemen itu dapat berupa judul, isi berita, gambar atau video, maupun keterangan gambarnya. Informasi seperti ini lazimnya disebar dengan menggunakan judul yang sensasional dan bombastis yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik pembaca. *Keenam*, informasi dalam bentuk konten yang salah, yaitu ketika informasi benar disebar dengan menggunakan konteks yang berbeda. Ini bisa dalam bentuk berita benar, namun disebar dengan gambar atau video yang tidak diambil dari realitas atau konteks yang sama dengan kejadian sesungguhnya. Sebagai contoh, berita tentang Muslim Rohingya disertai dengan foto yang menunjukkan keganasan biksu dan pemerintah Myanmar. Namun, setelah diselidiki bahwa diketahui foto tersebut bukanlah foto terkait dengan peristiwa tersebut, melainkan foto peristiwa lain, yaitu foto pasca bencana di China 2010, aksi protes di India 2012, bahkan kecelakaan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo 2010. Jadi, informasi yang beredar berasal dari peristiwa nyata, namun memiliki konteks yang berbeda dengan foto atau video yang disertakannya, sehingga membuat orang yang menerimanya salah memahami peristiwa tersebut (Ali-Fauzi, dkk., 2019).

Gambar 3 Contoh konten yang dimanipulasi



Sumber: Ali-Fauzi, dkk. (2019: 12)

Ketuju, informasi dalam bentuk konten yang dimanipulasi, yaitu konten berita yang dihasilkan dari proses modifikasi atas gambar, videol, atau tulisan untuk menciptakan makna yang berbeda dari konten aslinya. Konten yang dimanipulasi, terkadang, memiliki maksud untuk sekedar hiburan (misinformasi). Mesalnya, mengedit sebuah foto seolah sedang bersama seorang aktor terkenal, atau mengedit gambar seseorang sedang di suatu tempat tertentu. Namun, dalam konteks pemilu konten seperti ini acap kali juga dipakai untuk memelintir kebenaran atau bahkan memfitnah seseorang, lembaga, hingga kelompok yang memiliki identitas berbeda. Ini yang kemudian membuat informasi itu menjadi bagian dari disinformasi (Ali-Fauzi, dkk., 2019).

B. Hipotesis Penelitian

Dari beragam diskursus teoritik tentang hoaks yang dinarasikan di atas, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bahwa hoaks itu tidak memiliki jenis dan makna tunggal, melainkan memiliki banyak ragam, yaitu: (1) informasi yang masuk dalam kategori misinformasi, yang terdiri dari dua bentuk: koneksi yang salah dan konten yang menyesatkan; (2) informasi yang masuk dalam kategori disinformasi, yang terdiri dari empat bentuk: konten yang salah, konten tiruan, konten palsu, dan konten yang dimanipulasi; (3) informasi yang masuk dalam kategori malinformasi, yang terdiri dari mombocorkan rahasia, pelecehan, fitnah, dan ujaran kebencian.

Kedua, secara umum hoaks dipahami sebagai informasi palsu/bohong – baik dalam bentuk misinformasi, disinformasi, atau malinformasi – yang sengaja diciptakan dan didesain untuk mempengaruhi dan memprovokasi publik agar berpikir dan bertindak sesuai kepentingan pembuat dan menyebarkannya melalui media sosial atau jaringan internet. Merujuk pada teori ini, dalam konteks riset ini, hoaks diidentifikasi sebagai bagian informasi yang menipu (*deceptive pieces*) yang diciptakan secara sengaja untuk memperdaya orang lain dengan cara memanipulasi fakta atau kejadian yang dipalsukan, dimodifikasi, atau dimanipulasi informasinya. Pembuat konten *hoax* dengan sengaja memalsukan informasi, mengedit berita, video, atau foto

untuk meyakinkan orang lain bahwa berita bohong tersebut adalah benar dan autentik, sehingga mendorong mereka untuk menyebarkan berita tersebut ke jaringan internet, atau media masa, media sosial, dan aplikasi *chatting* lain dengan tujuan memperdaya publik (Utami 2018: 88). Ini sesuai dengan argument yang dibangun Chen et al.'s (2014) bahwa *hoax* dapat menyesatkan persepsi publik dengan menyebarkan informasi bohong sebagai suatu kebenaran. Dalam ruang politik kekuasaan, kontens *hoax* sengaja diproduksi dan dieksploitasi secara sengaja untuk menyerang lawan politik ketika itu memiliki potensi untuk memalukan atau menurunkan popularitas dan kredibilitas lawan politik.

Lebih lanjut, secara teoritik, dalam riset ini *hoax* diletakkan dalam bentuk teks dan pada waktu yang sama juga sebagai diskursus (*discourses*). Hoaks sebagai sebuah teks yang dipelajari dipilih secara acak berdasarkan pertimbangan viral atau tidaknya. Sebagai sebuah teks, *hoax* terdiri dari informasi verbal, tulis, gambar, dan elemen-elemen visual yang tersebar di media masa online, media sosial, dan aplikasi chatting. Dalam proses klarifikasi terhadap eksistensi hoaks baik dalam bentuk verbal, tulis, atau elemen-elemen visual, terdapat hubungan diantara penanda dan yang ditandai, denotasi dan konotasi, dan sesuai yang mengandung symbol. Ini sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Barthes (1973 dalam Salam 2018). Sedangkan *hoax* sebagai sebuah *discourses* dipahami sebagai informasi bohong yang mengandung beragam makna dan

ideologi yang dikontestasikan untuk memonopoli kebenaran. Sebagaimana yang terjadi dalam tatanan struktur masyarakat modern yang banyak terlibat dalam kontestasi ideologi tertentu untuk memperebutkan tentang kebenaran. Dalam post-struktural, proses kontestasi ini lah yang sebenarnya dapat disebut sebagai *discourses*. Ideologi sendiri lahir dari proses *discourse*, namun bukan semua *discourses* menjadi ideologi. Teori ini dikembangkan dari gagasan Foucault (1973; 1976) yang berpandangan bahwa “*infividuals/subjects are shaped by discourse.*” Begitu juga dengan hoaks dibentuk melalui discourse yang berkembang dalam struktur masyarakat modern, dan berpengaruh dalam membentuk identitas dan/atau persepsi publik tentang fenomena sosial-politik yang dihadapi.

BAB 3 METODE KAJIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan komprehensif, serta naturalistik dalam konteks khusus (Moleong 2005: 6). Dimana metode ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan, tulisan, gambar, video, dan perilaku yang dihasilkan dari fenomena politik yang diteliti (Hendrarso, 2008: 166). Dalam konteks penelitian ini, secara umum fenomena itu berkaitan dengan berita-berita yang mengandung konten hoaks yang memiliki singgungan dengan pelaksanaan pemilu. Sedangkan secara khusus, fenomena itu berkaitan dengan persebaran berita-berita yang mengandung konten hoaks yang menyerang penyelenggara pemilu di 2019, serta berkaitan dengan respon dan perilaku para penyelenggara pemilu di wilayah Jawa Tengah, baik penyelenggara pemilu di level provinsi maupun di level kabupaten dan kota.

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan penelitian di lapangan (*field research*) secara objektif terhadap kenyataan subjektif dari yang diteliti. Oleh karena

itu, pelaksanaan penelitian itu sendiri tidak bersifat subjektif, tetapi tetap dilaksanakan secara objektif keilmuan. Dalam hal ini subjektivitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti. Kenyataan tersebut dilihat dari sudut pandang orang-orang yang terlibat sebagai subjek penelitian ini (Hendrarso, 2008: 175). Dengan kata lain, melalui metode penelitian kualitatif, penulis mengeksplorasi pengalaman subjektif yang dimiliki oleh individu, kelompok masyarakat, dan institusi yang diteliti, serta makna yang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman tersebut (Mars dan Stoker, 2010: 242). Ini khususnya digunakan untuk menganalisis data-data berkaitan dengan respon, perilaku dan strategi yang diambil para penyelenggara pemilu 2019 dalam menghadapi serangan hoaks. Selain itu, metode penelitian kualitatif ini juga digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis data-data penelitian yang dikumpulkan melalui ruang virtual, khususnya pada media sosial, website, dan media *chatting* seperti aplikasi WhatsApp. Sederhananya, metode kualitatif digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami akar masalah di balik fenomena penyebaran informasi yang mengandung konten hoaks di Pemilu Serentak 2019. Sedangkan instrument utama dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. Upaya pengumpulan data, mereduksi, menginterpretasi, dan menganalisis data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrument penelitian.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama 2,5 bulan, yakni antara bulan September s.d November 2019. Upaya ini penulis lakukan dengan beragam teknik, yaitu pengumpulan data melalui kajian literature dan dokumentasi, observasi, wawancara mendalam dan FGD (*focus group discussion*) dengan sejumlah narasumber (informan) yang terlibat langsung maupun tak langsung dengan persoalan hoaks selama pelaksanaan pemilu serentak 2019. Ini adalah bagian dari metode triangulasi yang penulis lakukan sebagai upaya untuk menjaga keakuratan, validasi, dan objektivitas data penelitian. Berikut dipaparkan lebih lanjut dari setiap teknik pengumpulan data tersebut.

Pertama, pengumpulan data melalui *literature review* (kajian kepustakaan) dan dokumentasi. Usaha ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mereview literature-literatur yang membahas tema hoaks dan kaitannya dengan pemilu yang telah ditulis oleh para sarjana dari universitas-universitas dan lembaga negara baik berupa artikel jurnal, buku, monograf, maupun laporan riset kualitatif dan kuantitatif yang mengedepankan metode survei. Literature review ini tidak hanya sebatas pada kajian tema hoaks yang ada di Indonesia, namun juga kajian yang dilakukan oleh para sarjana tentang fenomena hoaks, atau *fake news* dalam literature Barat, yang ada di banyak negara,

khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan politik elektoral. Kajian ini dilakukan mulai sebelum penulisan proposal, di masa penulisan proposal, di masa riset lapangan, sampai dengan proses penulisan laporan penelitian dilakukan. Upaya ini penting dilakukan, karena tidak saja berguna dalam membangun kerangka teoritik, namun yang lebih penting adalah berguna membantu dalam mencari karakter dari ragam serangan hoaks yang ada, khususnya di negara-negara lain, dan juga berguna membantu mengungkap dan memecahkan akar masalah dibalik masifnya penyebaran informasi yang mengandung konten hoaks. Selain itu, literature review juga berguna membantu dalam mencari celah masalah yang belum banyak diperhatikan oleh sarjana lain dalam mengkaji fenomena hoaks di negara-negara demokrasi di wilayah selatan (dunia ketiga). Di sisi lain, upaya literature review ini juga dilakukan untu mendukung dan memperkuat argument-argumen yang disuguhkan dalam laporan penelitian ini. Dalam kaitan ini, penulis banyak menggunakan laporan-laporan riset yang menggunakan metode survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) terkait dengan internet dan fenomena hoaks di Indonesia.

Kedua, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada ruang virtual (*virtual sphere*). Namun, secara khusus observasi ini dilakukan pada

beragam media masa online, website KPU, dan dua website yang secara khusus mengumpulkan berita-berita hoaks setiap bulannya dari beragam isu, mulai dari isu kesehatan, agama, hukum, hingga isu sosial-politik, yaitu **TurbackHoax** (<https://turnbackhoax.id/forum/>) dan **Stophoax** (<https://stophoax.id/>). Pada website-website tersebut, penulis melakukan observasi langsung untuk menelusuri, mengamati, mengumpulkan, dan memilah-milah beragam informasi yang mengandung konten hoaks yang menyerang KPU di pemilu serentak 2019 yang disebar di jaringan internet, seperti: media masa online, media sosial (seperti Facebook, Twitter, dan Instagram), Youtube, dan aplikasi chatting WhatsApp. Pada observasi ini penulis membatasi diri pada konten hoaks yang tersebar di ruang virtual mulai bulan Juli 2018 s.d Mei 2019. Batasan ini dilakukan karena pertimbangan bahwa di masa-masa itu intensitas penyebaran konten hoaks yang memiliki singgungan dengan proses pelaksanaan pemilu 2019 cukup massif.

Ketiga, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*). Selama penelitian berlangsung penulis telah melakukan wawancara mendalam pada sejumlah narasumber yang terlibat langsung atau berpengalaman dalam menerima, mengamati, dan menangani penyebaran konten hoaks, serta pihak-pihak yang menjadi sasaran penyerangan konten hoaks di Pemilu Serentak 2019. Diantara narasumber itu berasal dari unsur anggota KPU Provinsi, KPU Kota Semarang, KPU

Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Bawaslu Jawa Tengah, Mafindo, Dinas kominfo Jateng, Deskrimsus Polda Jateng, Wartawan, dan Akademisi.

Wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber tersebut dilakukan dengan cara tidak terstruktur (*unstructured indepth-interview*), dimana peneliti memberikan ruang yang leluasa pada informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dan juga memungkinkan terjadinya dialog dalam proses wawancara. Sebagaimana dijelaskan Spradley (1979, dalam Fontana & Frey, 2009: 508) bahwa aspek fundamental dari metode wawancara tak-terstruktur adalah kukuhnya hubungan antara peneliti dengan informan dan hasrat untuk memahami lebih dari pada sekadar untuk menjelaskan masalah. Teknik wawancara model ini digunakan oleh penulis untuk memahami secara komprehensif kompleksitas masalah terkait dengan penyebaran infomrasi yang mengandung konten hoax terhadap penyelenggara KPU.

Keempat, pengumpulan data dilakukan dengan membuat *focus group discussion* (FGD). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam dan mengkroscek informasi yang telah didapatkan melalui tiga teknik pengumpulan data di atas. Selain itu, pengumpulan data melalui FGD ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menyerap informasi secara global dan komprehensif dari banyak sumber dalam waktu yang singkat

tentang masalah yang diteliti. Sehingga proses ini membantu peneliti untuk mencari akar masalah utama dari masifnya penyebaran konten hoaks yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2019 dan konten hoak yang ditujukan untuk menyerang penyelenggara pemilu. Pungumpulan data melalui FGD ini telah dilakukan sebanyak satu kali yang berlangsung selama satu hari dengan mengundang para pakar yang mendalami isu hoaks, yaitu dari presidium Mafindo (masyarakat anti fitnah Indonesia), anggota Polri yang secara khusus menangani *cyber crime* di wilayah Jawa Tengah, dan komesioner KPU Jawa Tengah. Posisi mereka pada kegiatan FGD dijadikan sebagai narasumber. Sedangkan yang menjadi peserta aktif dalam kegiatan FGD ini adalah beberapa perwakilan dari unsur anggota KPU Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah, KPU Kota Semarang, KPU Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Demak, dan KPU Kabupaten Tegal, serta peserta dari kalangan akademisi kampus dan wargawan lokal yang memiliki fokus kajian pada persoalan politik elektoral dan isu hoaks.

C. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis data secara induktif, yaitu proses analisis yang dilakukan dengan cara mencari pola, kategori, dan mengkonstruksi ide pada tema penelitian dari informasi yang dikumpulkan langsung dari akar rumput, atau sumber

primer, secara “*bottom up*”. Ini dilakukan secara terus menerus dalam seluruh proses penelitian sampai tercapainya pengetahuan yang komprehensif tentang tema penelitian. Untuk tujuan itu, penulis telah melakukan interaksi yang intens dengan subjek penelitian secara langsung, dan bersama subjek penelitian pula konstruksi pengetahuan tentang tema penelitian ini dilakukan (Creswell 2007: 38-39).

Analisis data penelitian ini setidaknya dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data, memusatkan perhatian dan penyederhaan data, abstraksi dan transformasi data-data yang muncul di lapangan terkait dengan serangan konten hoaks terhadap KPU di pemilu serentak 2019. Proses ini berjalan terus-menerus selama penelitian ini berlangsung untuk secara cermat melakukan penggolongan, penajaman, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk tahap analisis berikutnya.

Tahap berikutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tertentu; naratif-deskriptif, matrik, bagan, jaringan, table, foto, dan sebagainya sehingga lebih mudah melihat apa yang terjadi di lapangan dan lebih memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data ini termasuk juga kegiatan memasukkan data-data yang dianggap relevan ke dalam bab-bab pembahasan. Penarikan kesimpulan akhir

dilakukan setelah semua tahap di atas dilalui, namun penarikan kesimpulan-kesimpulan kecil terjadi secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung hingga mendapatkan suatu kesimpulan akhir yang kokoh dari keseluruhan hubungan data yang telah direduksi dan disistematisasikan.

*Serangan Hoax Terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019:
Studi di Jawa Tengah*

BAB 4

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Internet dan Penyebaran Hoax di Indonesia

Pada bagian ini penulis hendak memberikan gambaran umum tentang bagaimana perkembangan teknologi internet dan kaitannya dengan masifnya penyebaran konten hoax di Indonesia, khususnya di masa-masa politik elektoral baik di pemilu maupun pilkada. Pembahasan ini penting disajikan di bagian awal bab ini untuk memberikan pengantar sebelum masuk pada diskusi utama terkait dengan serangan hoax pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu serentak 2019. Ini sebagai overview awal bagi pembaca bahwa informasi-informasi yang mengandung konten hoax yang menyerang KPU di pemilu serentak 2019 merupakan bagian di *antara* bentuk-bentuk hoax dalam masalah politik yang mewarnai proses demokratisasi di Indonesia kontemporer.

Masifnya penyebaran konten hoax di Indonesia, pada dasarnya, mengikuti gelombang penggunaan konten hoax di banyak negara di dunia. Meskipun hoax sudah menjadi diskusi MacDougall di 1958, namun penyebaran konten hoax secara masif, khususnya dalam konteks politik elektoral, tidak dapat dilepaskan dengan adanya revolusi industry 4.0 yang menghadirkan system komunikasi masa secara cepat dan mudah melalui jaringan internet. Jaringan

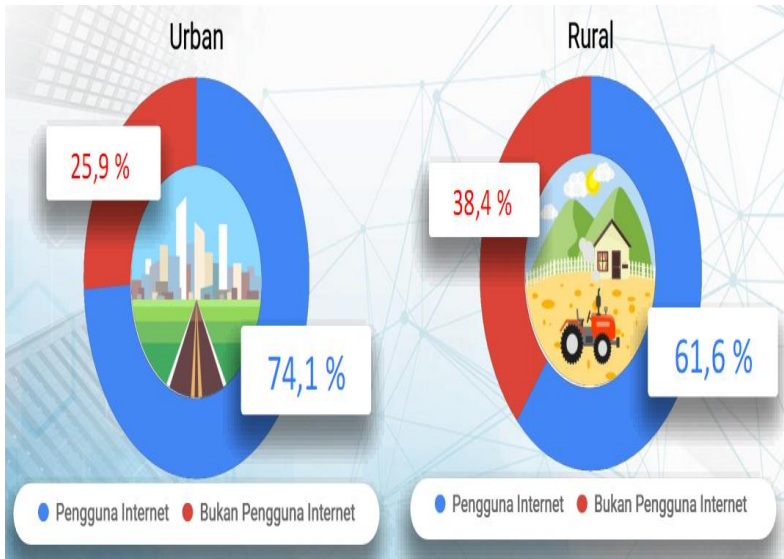
internet tidak saja menyediakan ruang komunikasi yang mudah dilakukan antara individu dan antar kelompok masyarakat, namun juga menyediakan penyebaran informasi atau berita palsu atau hoax yang dapat menyesatkan individu atau komunitas. Hadirnya media platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media *chatting* seperti WhatsApp, Line, dan sejenisnya telah membantu penyebaran konten hoax di banyak negara di dunia.

Di Indonesia sendiri, penyebaran konten hoax untuk beragam kepentingan juga terjadi dalam kurun waktu satu dekade ini berbarengan dengan masifnya jaringan internet yang masuk sampai ke wilayah-wilyah pedesaan. Saat ini hampir sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan internet untuk mendukung kebutuhan proses komunikasi dan mengakses informasi apa pun dari beragam sumber yang disediakan oleh jaringan internet. Berdasarkan hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2019 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 64,8 persen (atau 171,17 Juta) dari 264,16 juta jiwa penduduk Indonesia. Pengguna internet di Indonesia ini baik di wilayah perkotaan (urban) maupun di wilayah pedesaan (rural) relatif cukup tinggi, di mana wilayah perkotaan mencapai 74,1 persen warganya menggunakan internet, sedangkan wilayah pedesaan terdapat 61,6 persen menggunakan internet (APJII 2019). Berikut perbandingan pengguna internet di Indonesia pada wilayah

perkotaan dan pedesaan seperti disajikan pada Grafik 4.1 di bawah.

Grafik 4.1

Penetrasi Internet di Indonesia Berdasarkan Urban dan Rural



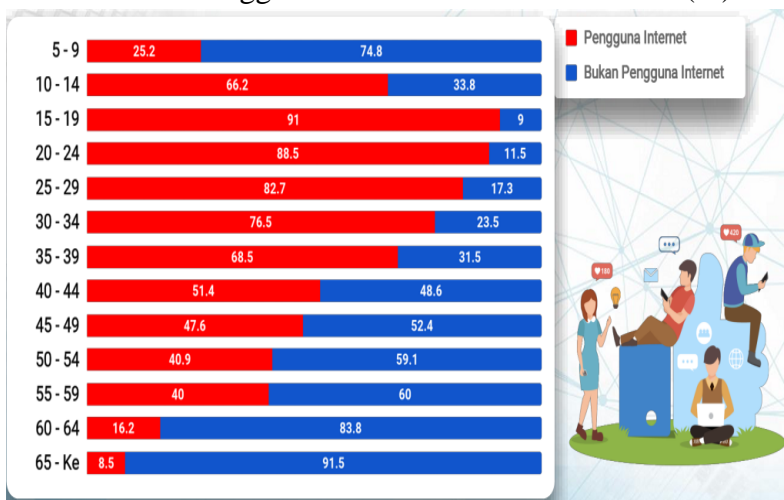
Sumber: Hasil Survei APJII 2019

Jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup besar tersebut didominasi oleh masyarakat berumur antara 15 tahun s.d 34 tahun. Artinya, anak muda adalah pengguna internet terbesar di Indonesia. Tidak heran jika kemudian disebut-sebut bahwa anak-anak muda di Indonesia saat lebih melek internet dan informasi dibandingkan orang tua (lihat Grafik 4.2). Namun perlu dicatat, bahwa pengguna internet

di Indonesia tidak saja masyarakat yang berpendidikan, namun mulai yang berpendidikan tinggi sampai dengan yang tidak berpendidikan (tidak sekolah) juga banyak yang menggunakan internet. Hanya saja, pengguna internet yang tergolong penuh, atau 100 persen menggunakan internet adalah warga yang memiliki pendidikan Strata 3 (doktoral) dan warga yang pernah kuliah tapi tidak tamat (APJII, 2019).

Grafik 4.2

Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Umur (%)



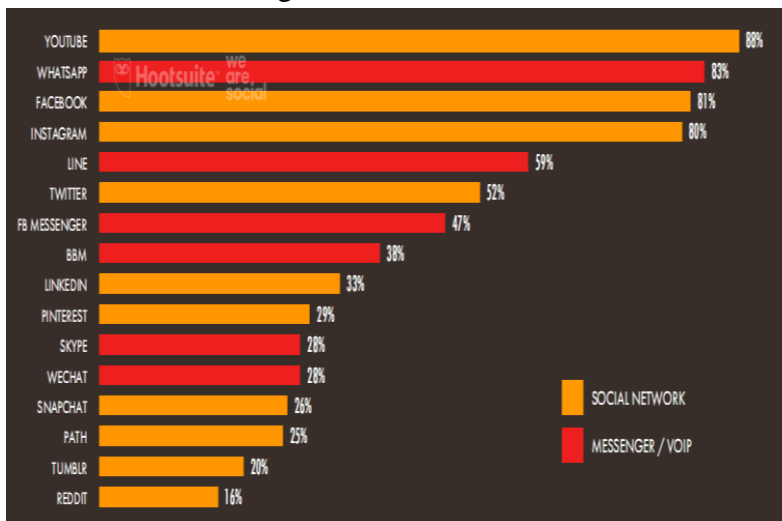
Sumber: Hasil Survei APJII 2019

Tingginya jumlah masyarakat di Indonesia yang menggunakan internet tersebut juga dibarengi dengan tingginya konsumsi mereka pada media sosial. Berdasarkan

survei Hootsuite¹ di 2019 menunjukkan bahwa 56 persen dari penduduk Indonesia adalah aktif menggunakan media sosial, dan 95 persen dari pengguna media sosial itu adalah anak muda yang berumur 15 tahun keatas. Dimana 91 persen mereka mengakses internet dan/atau media sosial melalui alat komunikasi bernama Hand Phone (Mobile Phone). Rata-rata waktu yang mereka habiskan untuk menggunakan internet adalah 8 jam 36 menit setiap hari dan untuk menggunakan media sosial 3 jam 26 menit setiap hari. Diantara platform jaringan media sosial yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah Youtube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Ini sebagaimana disajikan pada Grafik 4.3 di bawah.

¹ Hootsuite merupakan sebuah situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring yang juga terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial lainnya, seperti: Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, MySpace, dan WordPress. Ini juga merupakan salah satu dari klien Twiter yang resmi.

Grafik 4.3
Platform Media Sosial dan Media Chatting Paling Banyak
Digunakan di Indonesia



Sumber: <http://www.globalwebindex.com>

Tingginya penggunaan jaringan internet dan media sosial di Indonesia tersebut menjadi salah satu faktor utama dari mudahnya beragam informasi tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, perkembangan ini juga telah menjadikan media sosial memiliki peran penting dalam kampanye politik yang dilakukan banyak partai politik dan politisi di masa-masa pemilu. Kondisi ini kemudian menarik perhatian para sarjana untuk mengkaji dan mengeksplorasi perkembangan penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, You tube, and lately Vlog (video blog) –

yang baru-baru ini mendapatkan popularitasnya di antara warga internet (citizen) sebagai media baru untuk mengekspresikan pemikiran dan pengalaman – sebagai platform yang menyediakan beragam pilihan strategis bagi kampanye politik di pemilu, khususnya di pemilu 2014 dan pemilu 2019 (Abdillah 2014; Budiharto & Meiliana 2018; Irawanto 2019).

Namun di sisi lain, perkembangan internet dan media sosial juga memiliki dampak negatifnya yang tidak kalah besar. Dimana perkembangan penetrasi internet, media sosial, dan aplikasi *chatting* juga telah ikut menyumbang masifnya penyebaran konten hoax di Indonesia. Dimana sebagian besar masyarakat pengguna internet menerima konten hoax di setiap harinya. Ini sebagaimana hasil survei Daily Sosial pada 2018 terhadap 2032 pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa 81.25% responden menerima kontens hoax melalui Facebook, sekitar 56.55% melalui WhatsApp, sebanyak 29.48% melalui Instagram, dan tak kurang dari 32,97% responden menerima hoax di Telegram. Masih ada platform media sosial lainnya yang juga dibanjiri hoax, misalnya Twitter, namun jumlahnya di bawah 30%. Banyaknya pendistribusian hoax di Facebook, WhatsApp, dan Instagram karena tiga aplikasi ini paling populer, paling banyak digunakan di Indonesia (Ali-Fauzi, dkk, 2019: 3).

Data masifnya penyebaran konten hoax di Indonesia yang disajikan di atas juga senada dengan hasil survey

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di 2017 (dengan 1.116 responden) dan 2019 (941 responden). Dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa data masyarakat Indonesia yang merasa telah menerima konten hoax lebih dari satu kali per hari di 2017 mencapai 17,2 persen, dan menurun (2,5 persen) menjadi 14,7 persen di 2019. Kemudian masyarakat Indonesia yang merasa menerima konten hoax setiap hari di 2017 mencapai 44,3 persen, dan menurun (9,7 persen) menjadi 34,6 persen di 2019. Namun, masyarakat Indonesia yang menerima konten hoax seminggu sekali mengalami peningkatan, dari 29,8 persen di 2017 menjadi 32,5 persen (naik 2,7 persen) di 2019. Kemudian masyarakat Indonesia yang menerima konten hoax satu bulan sekali naik dua kali lipat lebih, dari 8,7 persen di 2017 menjadi 18,2 persen (naik 9,5 persen) di 2019. Dari data ini meskipun rata-rata ada penurunan frekuensi penyebaran konten hoax di media sosial, tetapi jumlah penerima konten hoax di Indonesia masih relatif tinggi. Selain itu, bentuk konten hoax juga semakin bervariasi dan samar. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada Diagram 4.4 di bawah.

Grafik 4.4

Intensitas Masyarakat Menerima Hoax di Indonesia



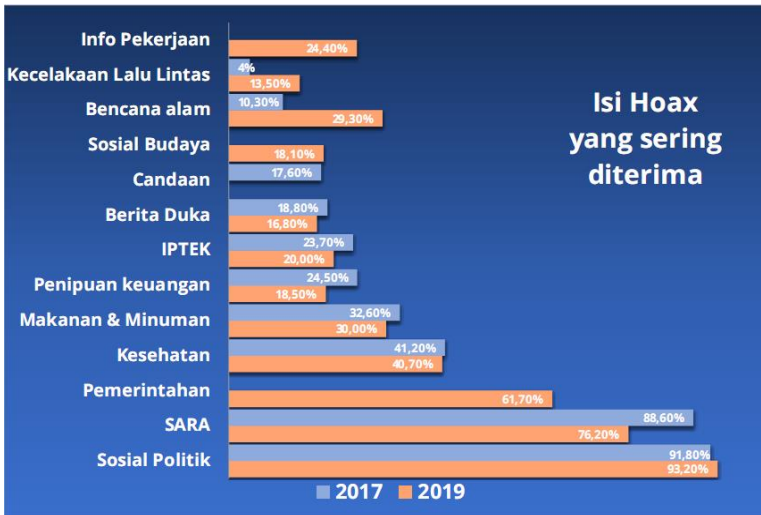
Sumber: Hasil Survei MASTEL 2017 & 2019

Konten hoax yang tersebar di Indonesia memiliki banyak jenis, mulai dari masalah kesehatan, sosial budaya, penipuan, bencana alam, hingga kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil survey Mastel 2019 juga menunjukkan bahwa jenis hoax yang beredar di media sosial didominasi tiga isu besar, yaitu isu sosial politik, SARA, dan pemerintahan. Dimana dari hasil survey Mastel terdapat kenaikan jumlah konten hoax terkait dengan isu sosial politik yang disebarakan melalui media sosial, yaitu dari 91,80 persen di 2017 menjadi 93,20 persen di 2019; dan mengalami penurunan konten hoax untuk isu SARA, yaitu

dari 88,60 persen di 2017 turun menjadi 76,20 di 2019. Sedangkan untuk isu pemerintahan terdapat 61,70 persen di 2019. Adapun isu-isu lain seperti kesehatan, sosial budaya, penipuan, bencana alam dan kecelakaan lalu lintas di bawah 50 persen. Informasi ini disajikan dengan lengkap pada Grafik 4.5 di bawah.

Grafik 4.5

Konten Hoax yang Sering Diterima Publik di Indonesia



Sumber: Hasil Survei MASTEL 2017 & 2019

Dari data hasil survey Mastel sebagaimana disajikan pada Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa tema sosial politik dan SARA sebagai komoditas utama produsen hoax di Indonesia. Data ini juga diperkuat dengan data yang berhasil dihimpun oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)

sepanjang Desember 2018 menunjukkan, bahwa frekuensi hoax terkait kedua isu itu menempati posisi teratas, dimana untuk isu politik ada di angka 40,90 persen dan isu SARA menempati posisi kedua di angka 17 persen (Ali-Fauzi, dkk, 2019: 3).

Tingginya isu politik dan SARA sebagai komoditas utama produksi konten hoax di Indonesia pada 5 tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari kontestasi politik nasional yang telah membuat masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling berseberangan, terdapat kubu populis radikal kanan di satu sisi, dan kubu nasionalis pluralis di sisi yang lain. Polarisasi ini terjadi di Indonesia pasca Orde Baru sejak pemilu presiden 2014. Pada waktu ini pula produksi hoax secara masif untuk kepentingan politik kekuasaan dilakukan di Indonesia (Salam 2018). Produksi dan penyebaran konten hoax dalam bentuk isu politik dan SARA eskalasinya mulai meninggi ketika proses pelaksanaan Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di 2017 (Utami 2018). Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari polarisasi masyarakat yang terjadi di Pilpres 2014 yang sudah mulai mereda dan kemudian kembali hidup lagi karena konflik horizontal diantara pendukung pasangan kandidat Anies Bawedan-Sandiaga Salahudin Uno dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Meskipun konflik antar pendukung ini terjadi di Jakarta, namun dampaknya sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta. Ini tidak dapat dilepaskan

dari perbedaan dari masa yang mendukung kedua kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Dimana kedua kandidat ini didukung oleh kekuatan masa yang secara ideologis cukup berlawanan, yaitu kubu populis radikal kanan yang mendukung pasangan Anies-Sandiga, dan kubu nasionalis pluralis yang mendukung pasangan Ahok-Djarot.

Kemudian pada pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak antara memilih anggota parlemen (DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota) dan memilih presiden-wakil presiden semakin memperuncing polarisasi masyarakat akibat kontestasi politik elektoral di tahun-tahun sebelumnya itu. Polarisasi ini salah satunya diakibatkan kandidat presiden yang berkontestasi di Pilpres 2019 adalah figur yang sama di Pilpres 2014, yaitu Joko Widodo (Jokowi) berhadapan dengan Prabowo Subianto. Selain itu, secara ideologis, masa pendukung kedua kandidat tersebut juga hampir sama dengan pendukung kandidat yang berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta di 2017, dimana terdapat kubu populis radikal kanan yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan kubu nasionalis pluralis yang mendukung pencalonan Jokowi.

Kondisi masyarakat yang terpolarisasi kedalam kedua kubu di atas yang kemudian semakin memperpanas tensi politik nasional dan berpengaruh pada masifnya penyebaran hoax yang bermuatan isu politik dan SARA di masa pemilu serentak 2019. Bahkan menurut Ali-Fauzi, dkk. (2019: 3) bahwa di masa-masa pemilu 2019 tidak jarang kedua isu

hoax tersebut saling tumpang tindih satu sama lain, dimana hoax berisi isu politik mengandung isu SARA, dan sebaliknya hoax berisi isu SARA juga dikaitkan dengan isu politik.

Hoax dalam bentuk campuran antara isu politik dan SARA cukup membahayakan dan perlu perhatian serius, karena didalamnya mengandung hasutan dan juga kerap merekayasa ketersinggungan. Ini yang lazim dikenal dengan pelintiran kebencian (*hate spin*), yaitu usaha-usaha yang disengaja oleh individu atau sekelompok orang dalam merekayasa kebencian, yang sebenarnya tidak ada. Konsep ini diperkenalkan Cherie George dalam bukunya *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy* (2016). Ia mengkaji kasus-kasus yang terjadi di tiga negara demokrasi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, India, dan Indonesia, dimana pelintiran kebencian pernah menjadi strategi politik dan disebarakan melalui media sosial. Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa hasutan atau pelintiran kebencian siring digunakan para politisi untuk memobilisasi dukungan politik dan menyerang kelompok lawan agar memenangkan pemilu. Oleh karena itu, hoax yang mengandung isu-isu seperti ini sangat mudah tersebar di masa-masa pemilu.

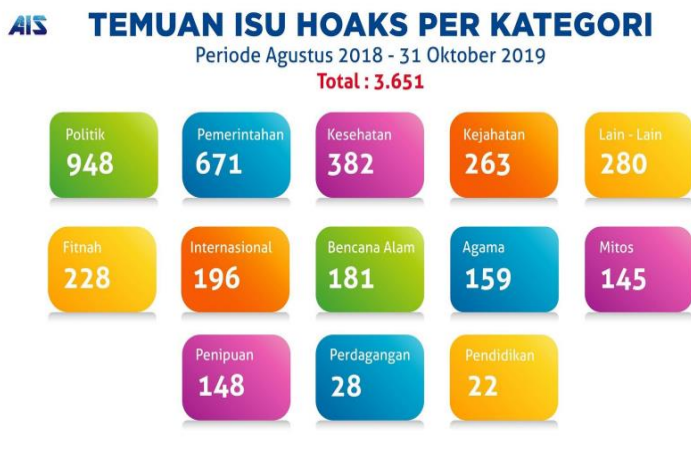
Informasi yang mengandung konten hoax berkaitan isu politik tidak saja menarik minat politisi untuk dijadikan instrumen mobilisasi dukungan politik elektoral, namun juga menjadi magnet bagi masyarakat luas untuk membaca dan

membagikannya melalui jaringan internet. Judul-judul berita hoax yang bombastis menjadi salah satu pemicu masyarakat lebih penasaran dan membaginya tanpa mengecek kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya, apalagi jika hoax politik itu mengandung isu SARA dan menguntungkan posisi politik mereka. Menurut penulis, situasi psikologis ini yang menjadi salah satu faktor mengapa konten hoax di momen-momen pemilu cukup masif penyebarannya di media sosial, portal berita, dan aplikasi chatting. Terkait hal ini, Mafindo mencatat penyebaran hoax menjelang Pemilu 2019 jumlahnya meningkat. Data yang berhasil dikumpulkan Mafindo selama tiga bulan, yaitu Juli s.d September 2018, tercatat 230 hoax yang terklarifikasi sebagai disinformasi (Bayu 2018).

Meningkatnya konten hoax di masa-masa pemilu 2019 sebagaimana yang ditemukan Mafindo di atas juga senada dengan data yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Kominfo dan dirilis pada portal **kominfo.go.id**. Dimana data itu menunjukkan bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 s.d 31 Oktober 2019 setidaknya terdapat 3.651 koten hoax yang diproduksi dan disebar di Indonesia melalu berbagai jaringan internet, baik portal media, media sosial, maupun aplikasi chatting. Diantara hoax itu mencakup isu-isu yang masuk kategori politik (948 hoax), pemerintahan (671 hoax), kesehatan (382 hoax), fitnah (228 hoax), kejahatan (263 hoax), dan isu lain. Untuk informasi lebih jelas dapat dibaca pada Grafik 4.6 di Bawah.

Grafik 4.6

Isu Hoax Per Kategori

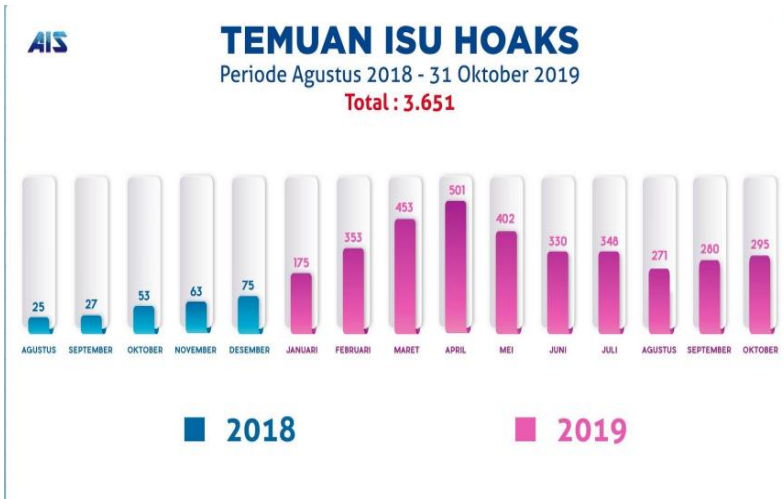


Sumber: Kementerian Kominfo

Terkait hal ini, Ferdinandus, Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, menjelaskan bahwa produksi dan penyebaran kontens hoax meningkat tajam di bulan April (Maharani 2019). Dari data yang telah dihimpun oleh Kementerian Kominfo ditemukan bahwa di bulan April terdapat 501 konten hoax. Sebagaimana tertera pada Grafik 4.6 di atas bahwa hoax yang mengandung isu politik adalah yang paling banyak, termasuk di bulan April 2019 (lihat Grafik 4.7). Hoax politik yang dimaksud di sini diantaranya berupa kabar bohong yang menyerang capres-cawapres, parpol peserta pemilu, dan KPU serta Bawaslu.

Grafik 4.7

Hoax di Setiap Bulan Selama Agustus 2018-Oktober 2019



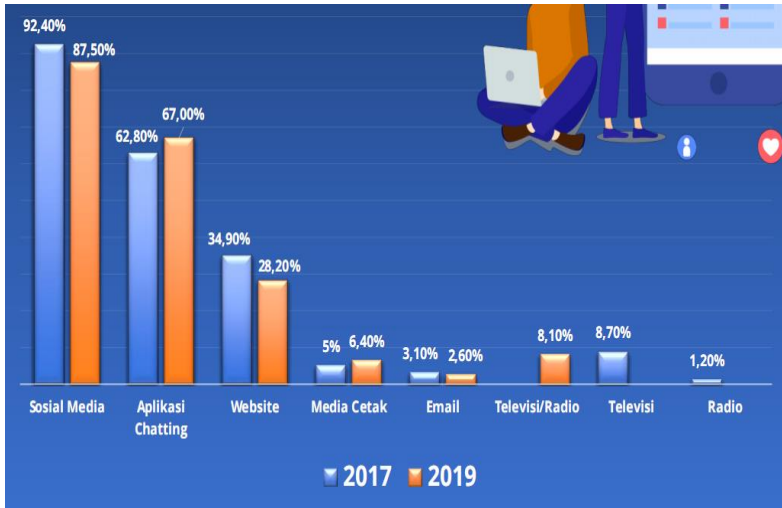
Sumber: Kementerian Kominfo

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa konten-konten hoax yang tersebar di masa-masa pemilu secara masif di atas bukan saja dilakukan oleh para buzzer yang memiliki kepentingan ekonomi, tetapi juga dilakukan oleh para elite politik dan pendukung mereka sebagai bagian dari strategi politik. Bahkan sekelompok masyarakat sipil yang hendak menghalau persebaran konten hoax tersebut juga diserang oleh mereka melalui rangkaian *bullying*. Terkait hal ini, di kegiatan *Focus Group Discussion* dalam proses penggalan data penelitian ini, salah satu presidium Mafindo mengatakan bahwa,

“kita sudah petakan hoax yang menyerang masing-masing kubu 01 dan 02 di masa pemilu 2019. Dari dua-duanya sebenarnya kena dan saling serang. Ini dilakukan oleh para buzzer dan pendukung masing-masing kandidat. Kita pun kena imbasnya. Terkadang kalau kita lagi mendebang hoax paslon 01, kita dibully sama lawannya, dan sebaliknya begitu.” (Farid Zamroni, 30 September 2019).

Banyaknya konten hoax di atas, baik yang berisi isu politik, SARA, maupun lainnya yang disebarakan melalui jaringan internet selama masa-masa pemilu 2019, paling banyak disalurkan melalui jaringan media sosial, aplikasi chatting, dan website atau portal media. Berdasarkan hasil survey Mastel di 2019 ditemukan bahwa terdapat 87,50 persen konten hoax disebarakan melalui media sosial, 67 persen melalui aplikasi chatting, 28, 20 persen melalui website, dan saluran lainnya tidak lebih dari 9 persen. Tingginya penyebaran konten hoax melalui media sosial (khususnya Fasebook) dan aplikasi *chatting* ini sebanding dengan tingginya penggunaan kedua perangkat itu sebagai media komunikasi modern di Indonesia. Berikut ini disajikan lebih komprehensif pada Grafik 4.8 di bawah.

Grafik 4.8
Saluran Penyebaran Berita Hoax di Indonesia



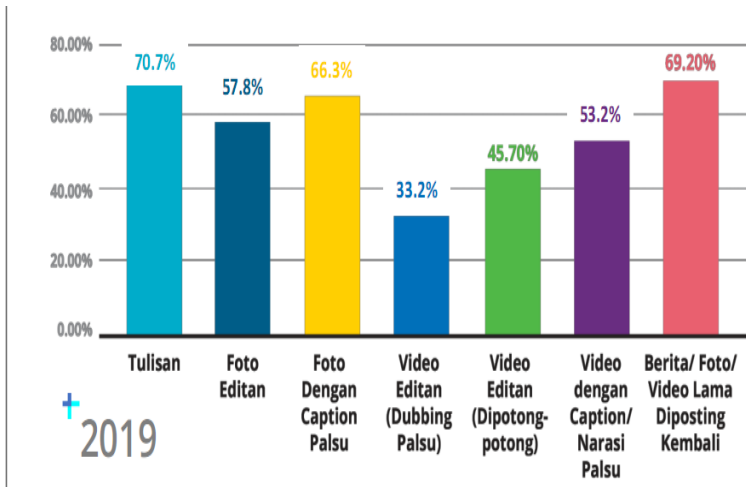
Sumber: Hasil Survei MASTEL 2017 & 2019

Adapun ragam bentuk konten hoax yang banyak diterima masyarakat dan disebarakan melalui saluran di atas cukup beragam. Ini mulai dari konten hoax dalam bentuk tulisan (70,7 persen), berita/foto/video lama yang diposting kembali (69,20 persen), foto dengan caption palsu (66,3 persen), foto editan (57,8 persen), video dengan narasi palsu (53,2 persen), video editan yang dipotong-potong (45,70 persen), dan video editan atau dubbing palsu (33,2 persen). Jika diamati secara seksama, ragam bentuk hoax ini berkembang dari yang paling sederhana sampai yang rumit dan kombinasi, serta beragam. Namun, bentuk hoax dalam

bentuk tulisan, berita/foto/video lama yang diposting kembali, dan foto dengan caption palsu menjadi yang terbanyak dan sering diterima masyarakat. Untuk memudahkan pembacaan, berikut ini disajikan dalam Grafik 4.9 di bawah.

Grafik 4.9

Ragam Bentuk Hoax yang Sering Diterima Masyarakat di 2019



Sumber: Hasil Survei MASTEL 2019

Fenomena penyebaran konten hoax di Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas, menurut penulis merupakan diskursus yang sengaja dibangun oleh para elit politik yang sedang berkontestasi dan para pendukung mereka. Analisis penulis, hoax yang menjadi sebuah diskursus yang dikontestasikan di pemilu 2019 (Pilpres) menysasar paling

banyak pada kandidat 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dibandingkan yang menysasar kandidat 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno. Diskursus ini sengaja diproduksi dan disebarakan melalui ruang virtual untuk mempengaruhi opini dan preferensi politik masyarakat, khususnya mereka kelompok masa mengambang (*floating mass*), dengan tujuan utama untuk mobilisasi dukungan elektoral dan memenangkan pemilu di 2019. Diskursus hoax yang berkembang di ruang-ruang virtual memiliki makna yang tidak tunggal dan saling berkontestasi untuk menunjukkan tentang satu kebenaran yang coba diperjuangkan guna menarik dukungan politik. Ekspansi teknologi internet di dunia, di Indonesia khususnya, telah menggiring ruang hidup di dunia nyata berpindah ke ruang-ruang virtual (*cyber space*). Ini telah menjadikan manusia lebih mudah untuk berkomunikasi dan mengekspresikan gagasan dan pikiran, serta mudah pula menerima informasi dari ruang publik virtual tanpa memastikan kebenaran yang dibawa dan sumbernya. Ini yang oleh banyak sarjana disebut-sebut sebagai era *post-truth*. Dapat dikatakan *post-truth* adalah era dimana ketika publik tidak lagi berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh apakah berita atau infomrasi yang diterima sesuai dengan fakta atau mis-informasi, alias *hoax*. Ini juga tidak dapat dilepaskan dari era dimana informasi atau berita yang cukup mudah didapatkan dan diakses dengan cara yang cukup mudah dan cepat melalui internet (Salam 2018: 315). Dalam konteks seperti ini,

mewacanakan suatu gagasan atau berita hoax dalam ruang virtual terus menerus, apalagi jika banyak mendapatkan like dan share pada account media sosial atau media portal yang menyebarkan, dapat mudah dianggap suatu kebenaran dan punya peluang besar menggiring opini publik. Hal ini pula yang mungkin juga terjadi pada konten-konten hoax yang diproduksi dan disebar untuk menyerang penyelenggara pemilu (KPU) di Pemilu Serentak 2019. Ini sebagaimana yang akan dieksplorasi di bagian berikutnya ini.

B. Serangan Hoax pada KPU di Pemilu 2019

Bagian ini menyajikan diskusi tentang hasil penelitian terkait dengan bentuk dan karakter konten hoax yang ditujukan untuk menyerang penyelenggara pemilu. Dari hasil penelitian penulis tidak banyak menemukan hoax-hoax yang didesain secara khusus untuk menyerang penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang ada di Jawa Tengah, baik di level provinsi maupun di level kabupaten dan kota di Pemilu 2019. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menyuguhkan pembahasan dan diskusi tentang serangan hoax secara general yang ditujukan untuk menyerang KPU yang ada di Indonesia, khususnya KPU RI.

Penelitian ini penemuan bahwa hoax yang tersebar melalui ruang virtual (*cyber space*) di Indonesia yang ditujukan untuk menyerang penyelenggara pemilu tidak tunggal. Senada dengan konten-konten hoax lain baik yang

ditujukan untuk saling menyerang kandidat maupun hoax-hoax terkait isu-isu sosial kebudayaan, hoax yang diproduksi dan disebarakan melalui ruang virtual untuk menyerang KPU di Pemilu serentak 2019 juga memiliki ragam kategori, bentuk dan karakter. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan setidaknya terdapat 35 konten hoax yang ditujukan untuk menyerang KPU, baik yang ada di level nasional maupun lokal. Namun, secara umum konten hoax tersebut ditujukan kepada KPU nasional. Dari 35 konten hoax itu penulis kumpulkan dari hoax-hoax yang disebarakan melalui jaringan internet mulai bulan Juli 2018 – Mei 2019. Semua konten hoax tersebut paling banyak disebarakan melalui media sosial Facebook, Twitter, Youtube, dan Aplikasi chatting WhatsApp. Namun, Facebook adalah media sosial yang paling banyak digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan konten-konten hoax yang mengandung pesan menyerang secara langsung pada KPU, baik pada institusinya maupun para komisionernya.

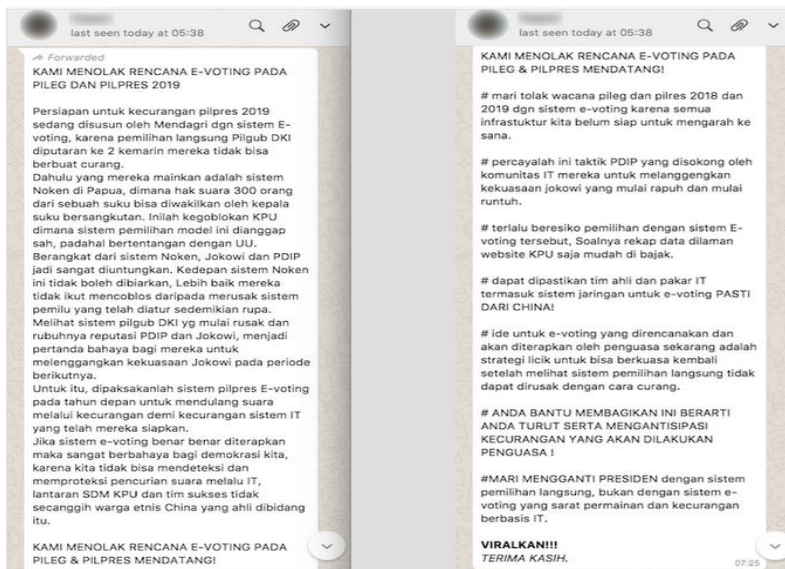
Dari ke-35 konten hoax tersebut, penulis mengelompokkannya kedalam 6 (enam) kategori hoax. Diantara keenam kategori hoax itu adalah sebagai berikut. (1) Hoax terkait rekayasa kecurangan oleh KPU sebanyak 5 jenis, (2) hoax terkait server KPU sebanyak 3 jenis, (3) hoax terkait logistik surat suara sebanyak 7 jenis, (4) hoax terkait DPT sebanyak 5 jenis, (5) hoax terkait pencoblosan sebanyak 7 jenis, (6) hoax terkait ancaman pada komisioner dan tuduhan ketidaknetralan KPU sebanyak 8 jenis.

Pengkategorian ini didasarkan pada narasi, pesan dan ide yang dibawa masing-masing konten hoax yang disebarakan untuk menyerang KPU di Pemilu 2019. Dari keenam kategori hoax yang menyerang KPU di Pemilu 2019 dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan di bawah.

B.1 Hoax Terkait Rekayasa Kecurangan oleh KPU

Konten hoax yang menyerang KPU di Pemilu 2019 dalam kategori rekayasa kecurangan yang dilakukan oleh KPU ada 5 (lima) jenis, diantaranya sebagai berikut. ***Pertama***, konten hoax yang menggunakan judul “Rencana E-Voting pada Pileg dan Pilpres 2019” dengan narasi “Kami menolak rencana *E-Voting* pada Pileg dan Pilpres 2019. Persiapan untuk kecurangan Pilpres 2019 sedang disusun oleh Mendagri dengan system *E-Voting*, karena pemilihan langsung Pilgub DKI diputaran ke 2 kemarin mereka tidak berbuat curang” (selengkapnya lihat Gambar 4.1).

Gambar 4.1
Hoax Rencana E-Voting di Pemilu 2019



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Secara teoritis konten hoax di atas masuk dalam kategori disinformasi, yang secara masif dan berantai disebarkan melalui aplikasi *chatting* WhatsApp, meskipun realitanya sejak 2017 pemerintah sudah memutuskan bahwa *E-Voting* masih belum urgen digunakan untuk pelaksanaan pemilu di Indonesia. Meskipun target ini ditujukan pada Kemendagri, namun memiliki kaitan langsung dengan penyelenggara pemilu. Ini dapat dipahami dari konten dan narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kesan seakan-akan pemerintah, khususnya penyelenggara pemilu

(KPU) sedang mendesain kecurangan melalui *E-Voting* untuk memenangkan kandidat petahana.

Kedua, konten hoax yang menggunakan judul “Bocoran Informasi Penting Valid Pola Kecurangan Sistem Penghitungan Suara KPU dengan Modus Nomor 01 dan 02” dengan narasi “Bocor, Bocor, Bocor!! Mereka Sudah Persiapkan Akan Memenangkan Koruf Meski dengan Kecurangan.” Secara teoritis ini masuk konten hoax kategori misinformasi, dimana secara masif dan berantai disebarkan melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial Facebook. Hoax bentuk narasi ini diproduksi dan disebarkan dengan membawa ide bahwa seolah telah terseting metode kecurangan yang akan dilakukan oleh KPU. Terkait konten hoax ini pihak KPU telah memberikan klarifikasi bahwa penambahan angka 0 pada nomor urut tidak mempengaruhi penghitungan suara, karena penghitungan suara di Pemilu 2019 tetap dilakukan secara manual dan hasil hitung dalam Formulis C1 discan dan diunggah ke web KPU.

Ketiga, konten hoax yang menggunakan judul “Video Emak-Emak Labrak Gudang KPU Jombang Jatim” dengan narasi “Relawan emak-emak Prabowo-Sandi geruduk kantor atau gudang KPU karena curiga dengan gerak-gerik petugas yang ingin memindahkan kotak surat suara ke tempat yang tidak lazim takut indikasi curang emak-emak pun labrak dan masuk ke Gudang.” Konten hoax ini termasuk kategori disinformasi, yaitu informasi palsu yang sengaja diproduksi dengan cara memanipulasi video dengan disertai narasi yang

dimaksudkan untuk membangun opini dan wacana bahwa KPU telah melakukan kecurangan, karena faktanya tidak ada kelompok masa yang mendatangi kator KPU di Jombang. Hal ini juga ditegaskan oleh Kapolres Jobang, yaitu AKBP Fadli Widiyanto. Penyebaran konten hoax ini melalui Youtube guna membangun ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara publik.

Keempat, konten hoax yang menggunakan judul “Madura Kacau, Ribuan Warga Sampang, Madura, Kepung KPU Tuntut Kecurangan, Massa Bentrok dengan Polisi” dengan narasi “Pecah!! Madura kacau, ribuan warga Sampang madura kepung KPU tuntutan kecurangan massa bentrok dgn polisi, KPU berhadapan dgn rakyat.” Konten hoax jenis ini disebar dalam bentuk video yang dibarengi narasi untuk membangun wacana dalam ruang publik virtual bahwa KPU di Madura telah melakukan kecurangan (lihat Gambar 4.2).

Gambar 4.2

Hoax Warga Sampang Madura Kepung KPU

diberi narasi :

"Pecah!! Madura kacau, ribuan warga Sampang madura kepong KPU tuntutan kecurangan massa bentrok dgn polisi, KPU berhadapan dgn rakyat"



Pecah!! Tuntut keadilan !! Madura, Indonesia kacau, ribuan warga Sampang madura kepong KPU

559 views

11 2 SHARE SAVE ...



Yekti Setyohingtyas

Published on Apr 22, 2019

Video dari Coach Yekti Setyohingtyas

SUBSCRIBE 1.7K

Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Konten hoax di atas memiliki bentuk yang hampir sama dengan hoax yang menyerang KPU Jombang di atas, yaitu memiliki tujuan utama untuk memprovokasi warga agar benar-benar mendatangi kantor KPU setempat dan membangun ketidakpercayaan publik pada penyelenggara pemilu. Hoax bentuk ini merupakan jenis disinformasi, yaitu upaya manipulasi realitas yang tersiar melalui video atas kejadian di waktu berbeda. Info yang benar terkait konten hoax ini adalah kejadian itu bukan Pemilu yang diadakan 17

April 2019, melainkan Pilkada serentak 2018 yang diadakan di Sampang.

Kelima, konten hoax yang menggunakan judul “Siarang Kecurangan Pilpres TV Al Jazeera” dengan narasi “TV Al-Jazeera menyiarkan kecurangan Pemilu di Indonesia, bikin geger Dunia. Pemilu curang telah dipertontonkan oleh Rezim Jokowi yang merusak citra Indonesia dimata dunia, demokrasi sudah mati di Indonesia. Itu Wiranto kalau berani suruh tutup.” Konten hoax jenis ini disebarkan dalam bentuk video yang disertai narasi/tulisan, dan disebarkan melalui jaringan media sosial Facebook dan Twitter. Ini termasuk konten hoax jenis disinformasi, yang merupakan manipulasi berita (lihat Gambar 4.3).

Gambar 4.3

Hoax Video Siaran Kecurangan Pilpres oleh TV Al Jazeera



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Konten hoax di atas sengaja diproduksi dan disebarakan dalam rangka membangun opini dan wacana internasional bahwa penyelenggaraan pemilu 2019 di Indonesia dilaksanakan dengan penuh kecurangan. Dari ide yang dibawa dalam konten hoax tersebut, sebenarnya produsen dan yang menyebarkannya berusaha untuk membangun diskursus di level internasional bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia telah mundur dan mati.

Selain itu, ini dilakukan sebagai langkah untuk mencari dukungan dunia terkait agenda mereka untuk melakukan gerakan-gerakan delegitimasi atas lembaga penyelenggara pemilu, sehingga hasil Pemilu 2019 yang memenangkan kandidat petahana dapat dipersoalkan dan digugat. Ini juga dimaksudkan agar proses gugatan itu dapat disaksikan oleh publik internasional agar mendapatkan dukungan dalam skala internasional pula. Namun demikian, informasi hoax ini telah disayangkan dan disesalkan oleh pihak Al Jazeera Media Network karena berita yang beredar tersebut merupakan editan dan diberi caption di luar konteks dan tentu dapat membingungkan publik internasional.

Dari kelima jenis hoax yang menyerang KPU dengan isu kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 diproduksi dalam beragam bentuk dan karakter, mulai dari bentuk manipulasi berita, membuat informasi palsu yang disertai dengan gambar atau video yang sudah diedit, sampai pada narasi panjang yang disebarkan secara berantai melalui aplikasi *chatting*. Sedangkan saluran media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan konten hoax di atas adalah media sosial Facebook dan aplikasi chatting WhatsApp. Ini senada dengan data pengguna internet di Indonesia sebagaimana disebutkan di bagian atas bahwa kedua media tersebut paling banyak digunakan oleh netizen di Indonesia.

Dari hasil analisis pada beragam bentuk konten hoax yang masuk kategori ini, penulis berargumen bahwa secara

umum ide atau pesan utama yang terkandung dalam konten-konten hoax tersebut adalah hendak membangun diskursus di ruang virtual guna mempengaruhi publik agar menerima kondisi bahwa seolah-olah ada skenario dari penyelenggara pemilu untuk memenangkan kandidat tertentu dengan melakukan serangkaian rekayasa kecurangan. Tujuan utama dari upaya ini tidak lain adalah untuk membangun ketidakpercayaan (*distrust*) publik kepada penyelenggara pemilu, sehingga memungkinkan untuk mendelegitimasi hasil pemilu ketika tidak memiliki keberpihakan pada mereka yang memproduksi dan menyebarkan konten-konten hoax kategori ini. Proses delegitimasi ini secara politik dinilai dapat menjadi pendorong untuk menggerakkan mass agar menolak hasil pemilu yang telah dilaksanakan dengan cara konstitusional. Menurut penulis, model-model hoax seperti ini penting untuk diperi perhatian bagi pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, agar pada masa-masa pemilu atau pilkada kedepan tidak kembali muncul di Indonesia, karena keberadaanya dapat mempengaruhi pandangan publik tentang lembaga negara penyelenggara pemilu.

B.2 Hoax Terkait Server KPU

Koten hoax yang menyerang penyelenggara pemilu di 2019 masuk dalam kategori server KPU lemah atau drekayasa dan cukup viral di ruang virtual Indonesia yang

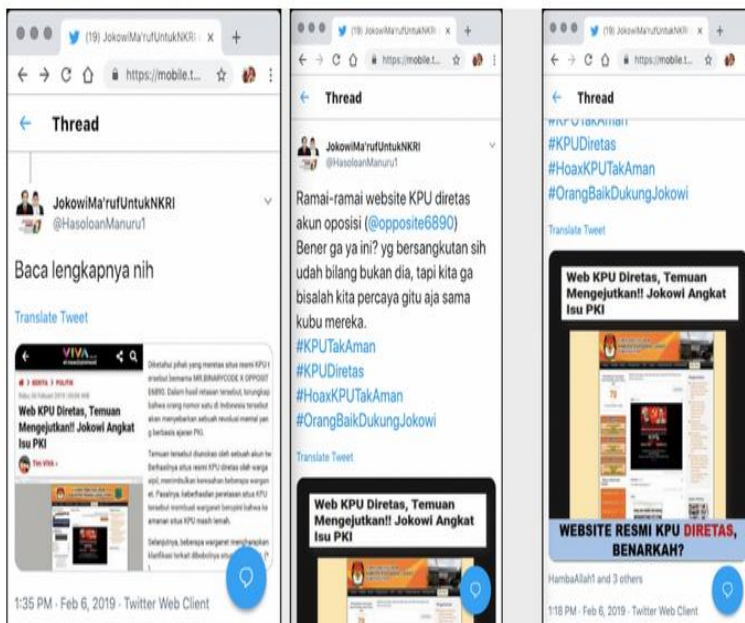
dapat penulis identifikasi ada tiga jenis dengan bentuk dan karakter yang berbeda-beda. **Pertama**, konten hoax dengan judul “hasil scanning port bolong” dengan narasi “KPU harus punya server sendiri. Ini bawa-bawa ITB, Moratel. Gimana pemilu berikutnya. RK alumni ITB alasan apapun KPU aneh. Ayo pemilu berikutnya KPU lebih professional. Lihat scan bawah bolong banyak gitu portnya.” Konten hoax ini viral tersebar melalui jaringan media sosial Facebook. Secara teoritis ini adalah hoax yang masuk kategori disinformasi, karena konten di dalamnya merupakan manipulasi atas informasi lain yang memiliki konteks berbeda. Melalui upaya manipulasi tersebut creator konten hoax tersebut berupaya untuk menggiring wacana publik bahwa server yang dimiliki KPU lemah dan bolong sehingga dapat diintrupsi dan memungkinkan untuk dapat dibajak. Terkait hal ini pihak KPU telah memberikan klarifikasi bahwa port-port yang diklaim “bolong” sebenarnya adalah port yang memang dibuka agar permintaan akses ke layanan yang diberikan oleh server bisa diakses oleh klien yang membutuhkan.

Kedua, konten hoax dengan judul “Tangkapan layar artikel Web KPU diretas, temuan mengejutkan!! Jokowi angkat isu PKI” dengan narasi “Ramai-ramai website KPU diretas akun oposisi” dengan diberi tanda #KPUDakAman dan #KPUDiretas. Hoax ini cukup viral dan pertama disebarkan melalui media sosial Twitter dengan akun

“JokowiMa’rufUntukNKRI”. Berikut gambar terkait konten hoax ini.

Gambar 4.4

Hoax Website KPU Diretas Akun Oposisi Beredar di Twitter



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Hoax di atas masuk dalam kategori disinformasi dalam bentuk tangkapan layar yang telah disunting dan dimanipulasi kontennya. Ini dilakukan dengan cara membuat bentuk dan karakter hoax seolah-olah dimuat di situs VIVA pada Rabu 6 Februari 2019 pukul 05.06 WIB. Namun jika dicermati, ada perbedaan penulisan format tanggal penayangan. Format tanggal dan bulan dalam cuitan tersebut

ditulis 06 Febuari 2019, sementara untuk tanggal di bawah 10. Padahal VIVA tidak pernah mendahului dengan angka 0 (nol), sedangkan untuk penulisan bulan, bukan Febuari melainkan Februari. Terkait hal ini, redaksi VIVA menanggapi bahwa pihaknya tidak pernah memuat artikel seperti pada judul hoax yang disebarakan melalui media sosial Twitter tersebut pada Rabu 6 Februari 2019. Ini sebagaimana dimuat dalam penjelasan yang ada dalam situs TurnBackHoax yang dikelola oleh Mafindo.

Ketiga, konten hoax tentang tuduhan bahwa sever KPU telah disetting untuk memenangkan Jokowi dengan perolehan suara 57 persen di pemilu 2019. Hoax ini tersebar dalam bentuk video yang yang memperlihatkan seorang pria berbicara di sebuah pertemuan tentang banyak hal, dan salah satunya terkait dengan KPU. Dalam video itu dia mengatakan “di KPU, saya bulan Januari ke Singapore karena ada kebocoran data. Ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%.” Konten hoax ini telah beredar luas ke berbagai platform media sosial (seperti Facebook) di masa-masa mendekati hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Salah satunya tangkapan layar pada Facebook dengan akun “Rahmi Zainuddin Ilyas” yang diketahui mengunggah dan menyebarkan konten hoax dalam bentuk video itu pertama kali dengan memberi tambahan narasi “wow, server KPU ternyata sudah disetting 01 menang 57% tapi jebol atas kebesaran Allah meskipun sudah dipasang 3 lapis”. Berikut ini disajikan dalam Gambar 4.5 di bawah.

Gambar 4.5

Hoax Server KPU Disetting Menangkan Jokowi



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Konten hoax terkait dengan tuduhan bahwa server KPU telah disetting untuk memenangkan kandidat petahana (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) di Pemilu 2019 tersebut di atas termasuk dalam kategori misinformasi yang dapat menyesatkan publik. Penyesatan ini dapat menggiring wacana dan opini publik bahwa institusi penyelenggara pemilu seolah tidak memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Lazimnya hoax dengan judul yang sangat bombastis seperti ini mudah menarik warga virtual (netizen) untuk mengkonsumsinya dan menyebarkan ke khalayak yang lebih luas melalui jaringan internet. Dari tangkapan gambar pada

akun Facebook yang dilakukan oleh Mafindo sebagaimana dimuat dalam situs TurnBackHoax pada 4 April 2019, hoax bentuk ini sudah dibagikan sebanyak 13.915 kali. Bahkan konten hoax ini juga menyebar melalui aplikasi percakapan atau *chatting* seperti WhatsApp dengan darasi seperti ini: “Breaking News:exclamation: Pak wahyu mantan staff jokowi di solo bongkar server KPU di singapur udah setting kemenangan 01 57%!!!, jebol salah satu dari 7 servernya. Sebarkan. Viralkan :loud_sound:” (Syafitrah 2019).

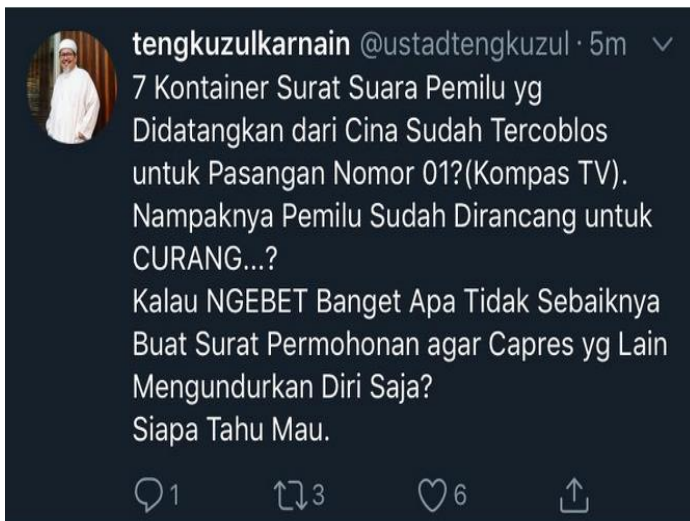
Oleh karena itu, hoax dalam bentuk ini telah cukup dapat membuat ekspresi dan mendapatkan respon yang keras dari KPU secara kelembagaan. Di level nasional ketua komisioner KPU tidak saja memberikan klarifikasi terkait informasi tersebut adalah tidak benar dan hoax, namun juga melaporkan orang yang diketahui memproduksinya. Menurut pihak KPU, tuduhan melalui konten hoax yang disebarkan melalui ruang virtual itu tidak memiliki dasar, dan ini dinilai telah merugikan KPU secara kelembagaan, karena tidak saja dapat membangun diskursus yang dapat menggiring ketidakpercayaan publik pada penyelenggara pemilu tetapi juga dapat mendelegitimasi institusi KPU sebagai lembaga resmi yang bertugas menyelenggarakan pemilu di Indonesia.

B.3 Hoax Terkait Logistik Surat Suara

Koten hoax yang menyerang penyelenggara pemilu di 2019 masuk dalam kategori problem surat suara juga cukup

viral baik di media sosial maupun aplikasi chatting seperti WhatsApp. Hoax dalam bentuk ini yang berhasil penulis himpun cukup banyak, yaitu ada tujuh jenis dengan bentuk dan karakter yang berbeda. Namun, pesan yang hendak disampaikan bahwa ada ketidak-profesionalan dan upaya kecurangan dalam pengaturan logistic surat suara yang sedang dilakukan KPU untuk mendukung kandidat petahana. Diantara kedelapan konten hoax itu adalah sebagai berikut. **Pertama**, konten hoax tentang tujuh container surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priyok. Hoax ini tersebar cukup viral di media sosial (Facebook dan Twitter) dan menjadi pesan berantai di WhatsApp dalam bentuk foto yang disertai audio suara dan narasi “cek tangkapan layar dan rekaman layar pemutaran audio”. Salah satu yang membuat viral hoax bentuk ini adalah keterlibatan tokoh-tokoh politik dan agama yang ikut serta menyebarkannya melalui media sosial. Berikut tangkapan layar gambar diantara mereka yang ikut serta memviralkan hoax tujuh kontener surat suara yang sudah tercoblos.

Gambar 4.6
Hoax Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Konten hoax di atas masuk kategori misinformasi yang sengaja disusun untuk menyesatkan pandangan publik terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu. Konten hoax yang beredar di awal bulan Januari 2019 cukup membuat kaget dan panik penyelenggara pemilu, baik KPU RI maupun KPU yang ada di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara penulis dengan sejumlah komisioner KPU di Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena di masa awal informasi itu beredar dan sebelum diketahui bahwa itu merupakan konten hoax banyak warga yang meminta klarifikasi ke mereka. Ini yang

kemudian juga mendorong para komisioner KPU di daerah mencari informasi dan klarifikasi ke KPU RI. Selain itu, hoax bentuk ini juga memaksa KPU RI untuk melakukan penyelidikan langsung ke lokasi terkait dan membuat konferensi pers. Selain itu, informasi hoax bentuk ini selain viral dalam ruang virtual Indonesia, juga sempat meramaikan pemberitaan di media masa baik media online maupun cetak. Kondisi ini menunjukkan bahwa diantara hoax-hoax yang dibuat oleh para buzzer telah berhasil mengganggu proses pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia.

Kedua, hoax tentang tujuh container surat suara di atas juga diviralkan dalam bentuk yang berbeda, yaitu dengan memanipulasi gambar/foto yang memiliki konteks berbeda dengan foto sebenarnya dengan memberikan tambahan narasi “Buat cebong jangan nyinyir trus kalau bukti sudah di tangan kita, kalian mau apa, kalian jual saya borong buat. Saudar-saudara ku rapatkan barisan jangan dksi kendor dan buat alumni 212 pantau terus sampai pilpres selesai insaallah kemenangan ada di tangan kita amin YAROBAL alamin.” Ini diviralkan melalui media sosial Fasebook, sebagaimana pada Gambar 4.7 di bawah.

Gambar 4.7

Hoax Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos di Priok



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Dari Gambar 4.7 di atas menjelaskan bagaimana informasi yang mengandung konten hoax dengan judul yang didesain secara bombastis mudah menarik publik Indonesia untuk meng-share-nya. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa konten hoax itu sudah dishare sebanyak 28.926 kali. Hoax bentuk ini masuk dalam kategori disinformasi dalam bentuk foto yang dimanipulasi dan diedit serta menambah dengan narasi yang dimaksudkan untuk menggiring opini publik dan menyesatkan mereka agar memiliki persepsi negatif pada KPU, karena Pos SUMBER yang menyebarkan informasi yang sudah dibuktikan oleh KPU bahwa itu adalah

hoax, karena foto yang dimanipulasi tersebut adalah foto distribusi surat suara Pilkada Tangerang Selatan di 2015 (Sasmito 2019).

Ketiga, konten hoax tentang surat suara yang sudah tercetak sebelum tanggal 1 Januari 2019. Hoax ini disebarakan melalu media sosial Facebook dalam bentuk foto peristiwa lain untuk membingkai isu bahwa surat suara sudah tercetak dengan menambahkan narasi “Surat suara sebagian sudah tercetak,,sebelum tgl 1 januari,,foto ini saat Validasi di KPU tgl 2 januari,,ya kita bisa menilai sendiri,,siapa yg menyebarkan berita Hoax? KPU kah ataukah org yg dlm video yg sudah beredar luas itu,,hmmm.” Ini sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.8 di bawah.

Gambar 4.8
Hoax Suarat Suara Tercetak Sebelum Tanggal 1 Januari
2019



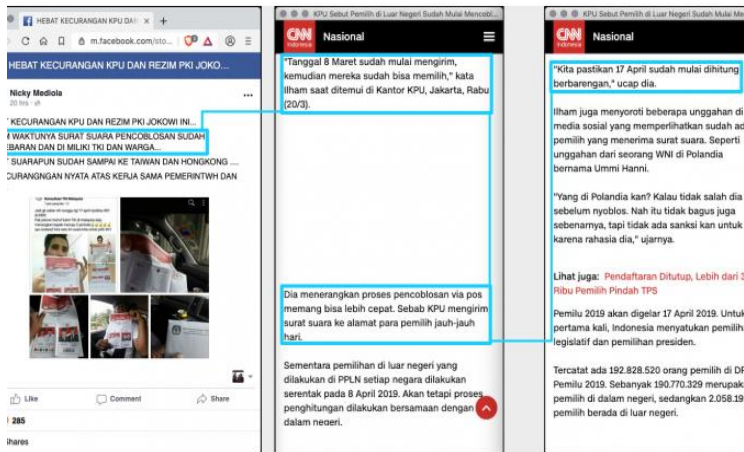
Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Fakta yang sesungguhnya dari di balik informasi hoax di atas adalah bahwa Post Sumber membagikan surat suara yang dicetak untuk keperluan validasi dan contoh persetujuan surat suara, serta dan contoh surat suara untuk 80 Dapil, bukan cetakan suarat suara untuk pencoblosan. Selain itu, dalam kaitan ini, Post Sumber menggunakan narasi yang tidak berhubungan dengan konteks foto yang sesungguhnya, untuk memelintir dan membangun premis (Sasmito 2019).

Keempat, konten hoax berkaitan dengan surat suara yang tercoblos untuk pemilih di luar negeri yang tersebar dan viral di media sosial Facebook. Hoax ini disebar

dengan judul “Belum Waktunya Surat Suara Pencoblosan Sudah Berterbaran” dalam bentuk foto yang disertai narasi “Hebat kecurangan kpu dan rezim pki jokowi ini...belum waktunya surat suara pencoblosan sudah berterbaran dan di miliki tki dan warga...surat suarapun sudah sampai ke taiwan dan hongkong...ini kecurangan nyata atas kerja sama pemerintah dan KPU.” Konten hoax ini disebarakan dengan membangun premis yang dipelintir bahwa telah terjadi kecurangan dalam bentuk kerjasama antara KPU dan pemerintah atau kandidat petahana. Ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4.9 di bawah.

Gambar 4.9 Hoax Surat Suara Tercoblos di Luar Negeri yang Dipelintir



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Terkait informasi hoax di atas, fakta yang terjadi sesungguhnya adalah untuk pemilih luar negeri yang mencoblos via pos memang sudah waktunya pada saat itu. Sedangkan surat suara juga sudah dikirim per tanggal 8 Maret 2019. Sebagian sudah sampai, tetapi perhitungan baru tetap dijalankan serentak di tanggal 17 April 2019 (Sasmito 2019). Ini termasuk konten yang salah dan masuk kategori hoax disinformasi, karena adanya kesalahan dalam memahami informasi atau sengaja dipilitir untuk membangun premis bahwa KPU telah merekayasa pencoblosan surat suara untuk memenangkan kandidat petahana di Pemilu 2019.

Kelima, konten hoax yang berkaitan dengan adanya surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan kandidat 01 di Medan. Konten hoax ini disebarakan dalam bentuk video yang disertai narasi “KPU di Medan sudah melakukan kecurangan dengan mencuri star untuk mencoblos 01. Di pergoki warga pendukung 02... Kecurangan sudah mulai dari tim jaenudin.. Kita kawal lebih teliti kpu yg di daerah lainnya.” Ini dilakukan untuk memprovokasi warga bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan KPU di Medan untuk memenangkan kandidat petahana. Berikut seperti disajikan pada Gambar 4.10 di bawah.

Gambar 4.10
Hoax Surat Suara Sudah Tercoblos 01 di Medan

[SALAH] Video Surat Suara Sudah Tercoblos 01 Di Medan

🕒 March 4, 2019 📍 Muhammad Khairil 📄 Fitnah / Hasut / Hoax 👁 0

jokowi dan kua ini nya mulai terdongkar.penguasa pangsat



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara (Sumut), Yulhasni, menyatakan video itu sebenarnya terjadi pada 2018 pada saat Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara. Saat itu menurut Yulhasni ada massa yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan mendatangi KPU Tapanuli Utara. "Jadi peristiwa itu sama sekali bukan peristiwa yang ada di kota Medan. Dan kami pastikan sampai saat ini KPU Kota Medan itu belum menerima surat suara presiden dan wakil presiden sampai sekarang," ucap Yulhasni.

Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Keenam, konten hoax bahwa surat suara dalam bentuk braile untuk pemilih disabilitas dalam hal tunanetra yang ada di Jakarta adalah 80 persen salah semua. Informasi ini disebarakan dalam bentuk video yang diberi narasi berikut: "KPU di Medan sudah melakukan kecurangan dengan mencuri star untuk mencoblos 01. Dipergoki warga pendukung 02... Kecurangan sudah mulai dari tim Jaenudin.. Kita kawal lebih teliti Kpu yang di daerah lainnya." Konten hoax ini disebarakan melalui media sosial

Facebook dan aplikasi WhatsApp. Hoax dalam bentuk ini sengaja diproduksi dan disebarakan untuk membangun wacana dan opini publik agar memiliki persepsi bahwa seolah KPU telah melakukan manipulasi atas surat suara untuk pemilih disabilitas kelompok tunanetra.

Ketujuh, konten hoax tentang adanya surat suara kosong dalam jumlah besar tertimbun di sebuah gudang percetakan yang ada di Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Konten hoax ini tersebar melalui media sosial Facebook dalam bentuk foto yang disertai judul “FPI temukan 4 ton surat suara kosong yang belum dicoblos tersimpan di Gudang Percetakan Tribun Timur.” Pada konten hoax ini juga disertai narasi berikut: “salut buat FPI yg menemukannya..surat suara kosong yang belum dicoblos.....yang disimpan di Tribun Timur (milik surya paloh)... jumlahnya sangat banyak sekitar 4 ton beratnya.” Ini adalah konten hoax dalam kategori disinformasi, karena kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Pada informasi yang disebarakan ini mengandung kebenaran di dalamnya, hanya saja dibubuhi pelintiran narasi untuk menggiri opini publik seolah-olah terdapat kertas suara dalam jumlah besar yang tidak rusak dan benar-benar ditimpun oleh pihak penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu kandidat. Viralnya informasi ini bisa disebabkan dua hal. Pertama, tersebar karena kesalahfahaman publik tentang informasi yang sebenarnya, karena tidak utuhnya informasi ini disebarakan. Kedua, sengaja disebarakan dan diviralkan

untuk tujuan menyerang penyelenggara pemilu di tengah-tengah tensi politik nasional yang memanas akibat terpolarisasinya masyarakat karena perbedaan pandangan dan pilihan politik atas kandidat presiden dan wakil presiden.

B.4 Hoax Terkait DPT

Konten hoax terkait dengan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ditujukan untuk menyerang penyelenggara pemilu di masa Pemilu 2019 yang telah penulis identifikasi ada lima jenis dengan karakter dan wacana berbeda. Ini dimulai dari menggiring opini publik untuk memiliki persepsi bahwa ada pengaturan penggelembungan DPT untuk mengatur kecurangan, menggiring opini tertentu dengan tujuan untuk menimbulkan kepanikan publik, membangun sentiment atas etnis tertentu, dan sampai pada tuduhan bahwa untuk memenangkan kandidat petahana KPU telah memberikan hak suara pada orang-orang gila. Dari keempat jenis hoax ini sebagaimana dijelaskan berikut.

Pertama, konten hoax tentang adanya 31 juta data pemilih misterius yang sengaja disembunyikan oleh pihak kemendagri dan tidak bisa diakses oleh KPU. Konten hoax ini diproduksi dan disebarakan melalui media sosial dan WhatsApp dalam bentuk narasi pada media daring, dimana narasi itu adalah “Kemendagri masukkan 31 juta data pemilih baru yang misterius dan tidak bisa diakses KPU.

Saran saya kalau sudah takut sekali kalah, keluarkan Perpu untuk 2 periode saja.” Fakta sebenarnya, menurut Kemendagri pada saat itu, Tjahjo Kumolo, bahwa sejumlah 31 juta data pemilih bukanlah data tambahan dan baru serta misterius sebagaimana hoax yang viral di media sosial. Data tersebut sudah terdapat pada saat penyerahan DP4 pada bulan Desember 2017 lalu. Selain itu, KPU juga bisa mengakses data tersebut.

Analisis penulis menjelaskan bahwa konten hoax di atas masuk dalam kategori bentuk misinformasi, yaitu informasi palsu dan tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Kepentingan di balik ini adalah membuat tuduhan seolah Kemendagri telah mengatur kecurangan untuk memenangkan kandidat petahana. Selain itu, juga menggiring opini publik agar memiliki persepsi bahwa KPU lemah terkait dengan pendataan pemilih di Pemilu 2019, karena masih kebocoran terkait dengan adanya data misterius yang jumlahnya besar itu. Ini dapat dibaca sebagai upaya untuk melemahkan penyelenggara pemilu secara institusional.

Kedua, konten hoax yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 oktober 2018 adalah batas akhir dari waktu pengecekan data pemilih. Hoax ini disebar dan viral di media sosial, khususnya Facebook, dengan narasi “sejak kemarin beredar kabar di media sosial mengenai kemarin (8 Oktober 2018) adalah batas tetakhir untuk mengecek apakah nama kita ada di daftar pemilih presiden pada pemilu 2019

mendatang lewat situs KPU [https://sidalih3.kpu.go.id/.](https://sidalih3.kpu.go.id/)” Hoax bentuk ini masuk dalam kategori misinformasi, karena berisi informasi yang salah. Tujuan dari produksi dan penyebaran konten hoax ini adalah untuk menimbulkan kepanikan warga.

Ketiga, konten hoax berkaitan dengan adanya rakyat China yang mendatangi KPU di Surabaya untuk didata sebagai DPT. Hoax ini beredar secara masif melalui media sosial dan aplikasi chatting dalam bentuk foto dengan judul “rakyat China sudah mendatangi KPU Surabaya untuk daftar sebagai DPT pemilu.” Selain itu, pada konten hoax tersebut dibangun narasi yang menghebohkan, yaitu “mereka sudah mulai beraksi datang KPU Bos. Foto ini diambil di gedung KPU daerah Surabaya Jawa Timur. Tampak rakyat China sudah mendatangi KPU untuk daftar sebagai DPT pemilu. Karena mereka sudah mengantongi E-KTP yang sudah dipersiapkan untuk mereka oleh rezim ngaciro, makanya mereka percaya diri sekali datang untuk mendaftar sebagai DPT.” Ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4.11 berikut.

Gambar 4.11
Hoax Rakyat China Datangi KPU Surabaya

Beredar Foto Rakyat Cina Daftar Masuk DPT di KPU Surabaya

▲ GURUH PERMADI Nasional



SUASANA DI KPUD
Surabaya - CINA Pada
NGURUS SURAT SUARA

Unggahan di akun Niki Ramzan yang menyebut rakyat Cina berbondong-bondong mendaftar ke KPU Surabaya agar masuk ke dalam



Niki Ramzan

20 Februari

Mereka Sudah Mulai Beraksi Datangi KPU
Boooooos.....

Foto Ini Diambil Di Gedung KPU Daerah Surabaya
Jawa Timur.
Tampak Rakyat Cina Sudah Mendatangi KPU
Untuk Daftar Sebagai DPT Pemilu.
Karna Mereka Sudah Mengantongi E-KTP Yang
Sudah Dipersiapkan Untuk Mereka Oleh Rezim
Ngaciro..... Makanya Mereka Percaya Diri Sek.
Datang Untuk Mendaftar Sebagai DPT.
Ini Baru Diketahui Di Surabaya..... Bekam Daeri
Yang Lainnya.

Terbukti Sudah Puluhan Juta DPT Siluman Suda
Dipersiapkan Untuk TKA China Yang Memakai
Identitas E-KTP Hasil Kloningan Dan E-KTP Rak
Indonesia.
Saatnya Rakyat Indonesia Bersatu dan Bangkit
Tumbangkan Rezim Ngaciro Di Pemilu 17 April
Mendatang.....!!!

Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Konten hoax itu pertama kali beredar di akun Facebook dengan Niki Ramzan (@niki.ramzan.50) yang membuat postingan bahwa rakyat China mendatangi KPU Kota Surabaya untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada akun @niki.ramzan.50 juga menekankan bahwa terbukti sudah puluhan juta DPT siluman dipersiapkan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) China dengan menggunakan identitas E-KTP kloningan rakyat Indonesia. Konten hoax ini beredar luas dan viral satu bulan lebih menjelang hari pemungutan suara 17 April 2019. Ini

adalah kategori hoax yang masuk disinformasi dan misleading konten. Jika dianalisis konten hoax ini hendak menggiring diskursus di ruang virtual tentang tidak adanya kredibilitas dan integritas pada lembaga penyelenggara pemilu. Diskursus ini didesain dengan tujuan utama adalah untuk mengikis kepercayaan publik pada KPU. Selain itu, isu itu juga diwarnai dengan membangun sentiment pada etnis tertentu yang ada di Indonesia. Ini seolah KPU dan pemerintah memiliki keperpihkan khusus pada warga beretnis Tionghoa,

Keempat, konten hoax berkaitan dengan rekayasa DPT dengan membuat KTP untuk orang gila dengan tuduhan karena ambisi kekuasaan dari kandidat petahana. Konten hoax ini viral tersebar di masa-masa Pemilu 2019 melalui saluran aplikasi WhatsApp dalam bentuk foto pembuatan KTP untuk orang gila yang diberi judul “pembuatan KTP orang gila demi ambisi kekuasaan.” Konten hoax yang diedarkan melalui saluran WhatsApp itu diberi narasi “Parah memaksakan hal tak wajar terus dilakukan demi ambisi kekuasaan... pembuatan KTP buat orang-orang gila, beneran ada di Bekasi.” Foto yang disebar itu adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 4.12 di bawah.

Gambar 4.12

**Hoax Pembuatan KTP untuk Orang Gila di Bekasi
Beneran ada di bekasi.**



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Hoax dengan bentuk di atas masuk kategori misleading atau disinformasi, karena berisi informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan akibat sudah dimanipulasi dan diedit oleh produsennya. Tindakan ini jika dianalisis sebenarnya produsen dan pihak-pihak yang ikut menyebarkan dengan kesadaran bahwa informasi itu adalah hoax memiliki tujuan untuk membangun diskursus publik bahwa KPU memberikan hak suara pada orang-orang yang terkena gangguan jiwa demi mendukung kemenangan kandidat petahana, meskipun sudah ditegaskan oleh KPU orang gila tidak diizinkan untuk memilih. Dengan demikian, bayangannya diskursus ini dapat mempengaruhi publik agar

memiliki ketidakpercayaan pada KPU sebagai penyelenggara pemilu karena ketidaknetralannya.

Terkait dengan informasi sebenarnya di balik konten hoax yang beredar tersebut adalah proses perekaman yang dilakukan oleh Dukcapil sebagai bagian dari kerja dalam melakukan perekaman e-KTP bagi warga Indonesia termasuk penyandang disabilitas jiwa atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terkait dengan prosesi penyampaian hak dalam pemilihan umum yang berlangsung di 2019. Kemudian terkait dengan fenomena ini, pihak ketua KPU RI, Arief Budiman, juga menyatakan pihaknya hanya mendata orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa sebagai pemilih. Ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2008 yang mengatakan bahwa warga yang terganggu jiwanya namun masih punya kesadaran untuk memilih, bisa diikutsertakan untuk menyalurkan hak pilihnya. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora juga menyatakan praktek Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memilih dalam Pemilu sudah berlangsung sejak 1995 (Helsyanto 2019).

Kelima, konten hoax berkaitan dengan pendataan orang gila yang dilakukan oleh KPU. Konten hoax ini hampir sama dengan yang terjadi di Bekasi sebagaimana dijelaskan di atas, hanya saja pada informasi hoax ini disebarkan dalam bentuk editan dan manipulasi video yang disertai narasi. Pada konten hoax tersebut, video yang

digunakan oleh post sumber adalah hasil suntingan dari video yang sudah beredar sebelumnya di internet, kemudian digabungkan dengan tangkapan layar judul artikel berita untuk membangun premis tertentu. Hoax dalam bentuk ini masuk dalam kategori disinformasi. Hoax dalam bentuk ini disebarakan dengan judul “ayo diralat lagi kebijakannya” dan narasi “kejadian kan, ayo diralat lagi kebijakannya! Daripada berabe ke depannya.” Seperti halnya dengan hoax yang terjadi di Bekasi, konten hoax ini disebarakan dan viral di media sosial dan WhatsApp untuk membangun premis seolah KPU sedang mendata orang gila untuk pendataan pemilih dan situasi menjadi kacau.

B.5 Haoks Terkait Pemungutan Suara

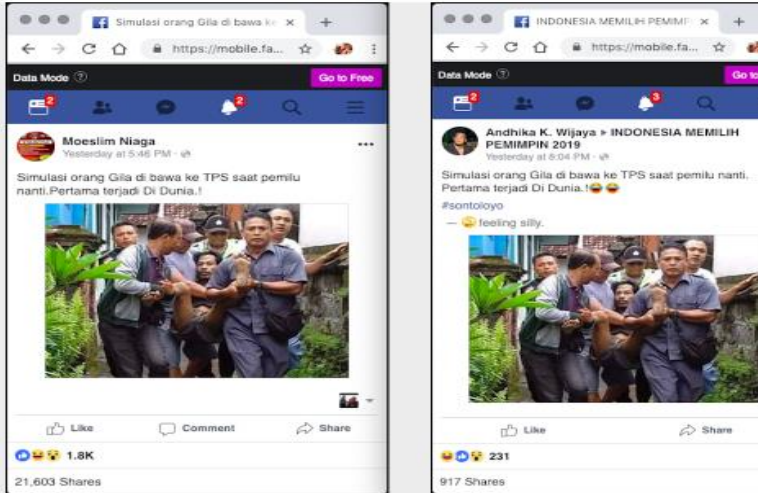
Konten hoax yang menyerang penyelenggara KPU berkaitan dengan isu-isu pencoblosan yang tersebar dan viral di media sosial, portal media, maupun aplikasi chatting seperti WhatsApp jumlahnya relatif banyak. Hasil penelitian ini menemukan tujuh jenis konten hoax yang identifikasi dengan bentuk, karakter, dan ide/wacana yang beragam, termasuk dampak yang ditimbulkannya juga berbeda. **Pertama**, hoax yang mengandung informasi bahwa KPU melakukan pemungutan suara melalui media sosial Facebook. Konten hoax ini tersebar luas melalui saluran media sosial Facebook melalui Fanpage Facebook atas nama Voting KPU Pusat dalam bentuk narasi dan diberi tautan

website yang berisi tentang aplikasi voting. Konten hoax ini disebarakan dengan judul “KPU lakukan voting pemilihan Capres melalui Facebook” dan narasi “ini voting 100 % real! Siapa calon presiden pilihan rakyat 2019? Klik bagikan agar kita bisa tahu suara rakyat. <http://tinyurl.com/kpupusat>.” Konten hoax yang dibuat dan disebarakan dalam bentuk ini masuk dalam kategori misinformasi, karena didalamnya sama sekali tidak mengandung kebenaran, atau informasi yang salah, namun banyak publik yang menganggap bahwa informasi itu benar. Karena itu, banyak netizen yang ikut serta memviralkan atau menyebarkan informasi tersebut. Terkait informasi hoax ini KPU telah memberi klarifikasi dan menegaskan bahwa Fanpage Facebook atas nama Voting KPU Pusat yang melakukan voting Calon Presiden 2019 bukan milik lembaga penyelenggara pemilu RI. Bantahan ini disampaikan melalui pers rilis yang ditulis oleh tim Humas KPU. Sanggahan tersebut sebagaimana dilansir dalam viva.co.id, kumparan.com, dan alinea.id, bahwa tim Humas KPU menyebutkan dalam rilisnya jika KPU tidak pernah melakukan voting terkait pemilihan Capres yang akan berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Demikian salah satu kutipan yang ditulis tim Humas KPU dalam rilisnya: “KPU tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan Voting terkait Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan/atau Pemilihan Legislatif” (Khiril 2018).

Kedua, hoax berkaitan dengan tuduhan bahwa KPU telah melakukan simulasi orang gila dibawa ke TPS untuk

memilih. Konten hoax ini disebarakan melalui media sosial Facebook dan cukup viral dengan judul “Simulasi Orang Gila Dibawa ke TPS Saat Pemilu Nanti. Konten hoax ini dalam bentuk manipulasi foto dan diberi narasi “Simulasi orang gila dibawa ke TPS saat pemilu nanti. Pertama Terjadi di Dunia.” Hoax ini pertama kali dipost oleh akus Facebook atas nama “Moeslim Niaga”, dan cukup viral di media sosial Facebook. Sampai tanggal 25 Desember 2018 pada saat tangkapan layar dilakukan oleh Mafindo sebagaimana dimuat dalam <https://turnbackhoax.id> bahwa konten hoax tersebut sudah dibagikan sebanyak 21.603 kali dan mendapatkan like 1800 kali. Ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4.13 di bawah ini.

Gambar 4.13
Hoax Tentang Simulasi Orang Gila Dibawa ke TPS Oleh
KPU



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Dari penyelidikan ditemukan bahwa konten hoax tersebut termasuk dalam kategori disinformasi, dimana creator hoax memanipulasi foto pengamanan penderita gangguan jiwa oleh aparat keamanan yang diduga telah membunuh dukun yang hendak mengobati. Karena itu, pada konten hoax tersebut menunjukkan ketidaknyambungan antara foto yang digunakan dan narasi yang dikampanyekan. Karena itu, ini merupakan tuduhan semata pada KPU telah melakukan simulasi pemilihan untuk orang gila, karena informasi tanpa didasari dengan fakta yang benar.

Ketiga, hoax berkaitan dengan pendatang dari China yang diberi arahan oleh KPU untuk mencoblos di TPS khusus. Konten hoax ini tersebar cukup viral melalui saluran media sosial Facebook dengan judul “Pendatang Cina Diberi Arahan oleh KPU untuk Memenangkan Petahana.” Konten hoax ini disebar dalam bentuk foto acara peresmian PLTU Celukan Bawang di Bali Tahun 2015 yang dimanipulasi dengan diberi narasi “pendatang Cina diberi arahan oleh KPU untuk memenangkan petahana, mencoblos di TPS khusus yang akan disiapkan tertutup untuk umum.. sangat hebat bukan!!” Berikut disajikan dalam Gambar 4.14 di bawah ini.

Gambar 4.14
Hoax Pendatang Cina Diberi Arahan oleh KPU untuk Mencoblos



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Konten hoax yang tersebar melalui media sosial Facebook tersebut di atas adalah kategori disinformasi. Dimana post sumber dari konten hoax menggunakan foto dengan menambah narasi yang dipelintir dari konteks yang sebenarnya. Ide utama dari konten hoax ini jelas bahwa sebagai bagian dari upaya untuk membangun opini publik atau diskursus di ruang virtual tentang bagaimana menaklukkan kecurangan sedang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memenangkan kandidat petahana yang notabene selama ini dinilai selama kepemimpinannya di periode pertama dekat dengan negara China.

Keempat, hoax berkaitan dengan diadakannya PSU (pemungutan suara ulang) yang akan dilaksanakan oleh KPUD Solo, Jawa Tengah, pada pemilu 2019. Konten hoax itu tersebar dalam bentuk foto atas pengumuman dalam bentuk tulisan pada selembar kertas yang diviralkan melalui WhatsApp dengan judul “Pemungutan Suara Ulang di Banjarsari Solo” dan diberi narasi “Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan Suara Hari/tgl: Rabu, 26 April 2019, waktu: 07.00 –13.00 dengan lokasi di TPS 14 di rumah Bp. Y.Legimen.” Berkaitan dengan ini pihak KPU setempat memberikan klarifikasi melalui tribunnews.com karena telah membuat banyak warga yang terkejut dan memicu kepanikan warga menanggapi kebenaran informasi tersebut. Ini termasuk dalam kategori misinformasi, yaitu informasi yang sengaja dibuat yang tidak memiliki dasar atas

fakta di lapangan dan dapat menyimpulkan penyesatan pada warga. Meskipun informasi ini tidak secara langsung menyerang institusi KPU, namun informasi hoax terkait dengan PSU ini telah menimbulkan kepanikan warga yang tentu mengganggu proses pelaksanaan rekapitulasi suara yang sedang berlangsung pada saat itu. Analisis penulis atas beredarnya konten hoax ini memungkinkan disebabkan oleh gelombang pelaksanaan PSU yang dilakukan di 21 tempat di Jawa Tengah akibat pengaruh konten hoax. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini di bawah.

Kelima, konten hoax terkait dengan pengerahan masa di Arab Saudi untuk mencoblos di Pemilu 2019 meskipun tidak memiliki identitas. Konten hoax ini tersebar luas melalui saluran media sosial Twitter pada akun bernama “Ranups Community” dalam bentuk video editan dan disertai narasi bernada provokasi “mau bantah, wahai Dubes Arab Saudi? Selesai magrib kumpul di TPS bersama untuk bisa nyoblos bagi yang tak punya identitas. Ini strategi PDIP yang bocor dari Arab Saudi! Hallo @KPU_ID@bawaslu_RI jangan tangkap yang sebar video dong! #PrabowoSandiOkBanget.” Konten hoax ini seperti disajikan pada Gambar 4.15 di bawah ini.

Gambar 4.15 Hoax Pengerahan WNI di Arab Saudi untuk Mencoblos



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Jika dilihat dari data yang ada, ini merupakan bentuk hoax yang masuk kategori disinformasi yang mengandung informasi palsu dan pelintiran, karena narasi yang dibuat tidak sesuai dengan konteks video yang sebenarnya (*false context*). Yang sebenarnya pada video itu terdapat seorang peria, yaitu Ketua DPLN PDIP Arab Saudi, Sharief Rachmat, yang sedang bicara mengenai persyaratan WNI di Saudi untuk mencoblos pada Pemilu 2019 dengan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Terkait hal ini, menurut Ketum Projo, Budi Arie Setyadi,

bahwa pernyataan ketua PDIP Arab Saudi tentang penggunaan Identitas SPLP tersebut tidak ada yang salah, karena SPLP adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh imigrasi KJRI atau KBRI di Arab Saudi. Sebagaimana mengacu kepada Pilpres di 2014, seluruh identitas dapat dipakai untuk menggunakan hak pilih (Stefanus 2019). Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa konten hoax yang disebarakan melalui saluran Twitter tersebut memiliki muatan kepentingan untuk memprovokasi publik, khususnya netizen, agar memiliki pandangan negatif bahwa KPU seolah membiarkan adanya mobilisasi pemilih tanpa identitas di Arab Saudi untuk mencoblos. Selain itu, ini juga merupakan upaya dari creator hoax membangun diskursus publik agar tidak memiliki kepercayaan atas institusi penyelenggara pemilu di 2019.

Keenam, konten hoax terkait dengan terbakarnya surat suara yang sudah dicoblos yang hasilnya memenangkan pasangan kandidat 02 di Malaysia. Hoax ini viral di media sosial Facebook dalam bentuk tampilan screenshot dari artikel berita tentang terbakarnya mobil pengangkut surat suara di Kinabalu, Malaysia. Dalam konten hoax itu diberi judul “di Malaysia sudah pencoblosan, pak Prabowo menang telak, tetapi kotak surat suara terbakar di jalan saat akan dibawa” dengan dibubuhi narasi yang bernada propaganda seperti ini “hari ini di Malaysia sudah pencoblosan. Pak Prabowo menang telak, tapi kotak surat suara terbakar di

jalan saat mau di bawa. Untung Form C1 sudah dipegang teguh sama relawan dan mereka gak bisa bantah lagi.”

Konten hoax ini menyebar luas melalui akun Facebook “Adiba” yang sudah dibagikan sebanyak 3.071 kali pada 10 April 2019 (Gambar 4.16). Hoax dalam bentuk ini masuk dalam kategori disinformasi, yaitu manipulasi video dengan memberikan narasi yang dipelintir keluar dari konteks asli dimana realitas itu diambil videonya. Realitas sebenarnya adalah surat yang terbakar merupakan surat suara yang belum dicoblos. Berdasarkan jadwal dari KPU RI, proses pemungutan suara di PPLN Kinabalu sendiri berlangsung pada hari minggu 14 April 2019 dan penghitungan suara untuk pemilu luar negeri di semua KBRI/KJRI baru dilaksanakan pada 17 April 2019 (Syafitrah 2019).

Gambar 4.16 Hoax Terbakarnya Kotak Suara di Kinabalu, Malaysia



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Ketujuh, konten hoax berkaitan dengan bolehnya memberikan suara di TPS mana saja asalkan memiliki E-KTP. Hoax dalam bentuk ini dibagikan sebagai pesan berantai secara luas melalui saluran WhatsApp dengan judul “hanya cukup punya E-KTP” dengan narasi pesan bahwa “syarat menjadi pemilih dalam pemilu sudah dirubah rezim dalam UU no 7 2017 Pasal 348, menjadi hanya cukup punya E-KTP. Pasal 349 makin gila karena walau tidak terdaftar di DPT, siapa saja bisa nyoblos di Pemilu Indonesia asal punya eKTP. Mereka cukup mengeprint E-KTP yg disesuaikan

alamatnya dengan TPS2 target mereka." Konten hoax ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4.17 di bawah.

Gambar 4.17

Hoax Dbolehkan Hanya Cukup Punya E-KTP



Sumber: Kemkominfo (2019)

Konten hoax yang tersebar melalui saluran WhatsApp tersebut di hari-hari pemungutan suara di Pemilu 2019 telah menghebohkan publik di banyak tempat, khususnya bagi masyarakat yang sedang berada jauh dari asal mereka tinggal, ini termasuk di wilayah Jawa Tengah. Hoax ini disebarkan untuk menggiring opini bahwa mencoblos cukup dengan menggunakan E-KTP bagi warga yang tidak memiliki Formulir C1 (Surat Undangan Mencoblos) atau Formulir A5 untuk pindah TPS mencoblos. Secara teoritis, analisis

penulis hoax ini masuk dalam kategori disinformasi, karena informasi yang disebar tidak disampaikan secara utuh tetapi dipelintir, sehingga kebenaran yang dibawa pesan berantai melalui WhatsApp itu tidak utuh, yang akibatnya telah membuat orang memiliki persepsi yang salah.

Adapun informasi yang benar terkait dengan himbuan menggunakan E-KTP sebagai syarat untuk dapat mencoblos di Pemilu 2019 adalah sebagai berikut. *Pertama*, syarat untuk menjadi pemilih sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak hanya memiliki E-KTP. Ada syarat-syarat lain yang juga harus dipenuhi, di antaranya, pemilik E-KTP yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS yang bersangkutan. Syarat-syarat lainnya, dapat dilihat pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Kedua*, terkait dengan pesan yang menyebutkan bahwa, "Pasal 349 makin gila karena walau tidak terdaftar di DPT, siapa saja bisa mencoblos di Pemilu Indonesia asal punya E-KTP. Mereka cukup mengeprint E-KTP yang disesuaikan alamatnya dengan TPS-TPS target mereka," juga perlu dipahami isi pasal tersebut secara keseluruhan. Pasal 349 UU Pemilu menyebutkan, setiap pemilik KTP yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilik Tetap (DPT) atau daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak bisa melakukan pencoblosan. Namun, ada ketentuan lain yang mengikutinya. Mereka yang memiliki hak pilih diperbolehkan mencoblos dengan ketentuan: (1) Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai alamat

yang tertera pada E-KTP. (2) Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat. (3) Pendaftaran dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS setempat berakhir. Jadi, dari penjelasan ini seorang pemilih tidak diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya lebih dari satu kali dengan berganti-ganti TPS (Kemkominfo 2019).

B.6 Hoax Ancaman Pada Komisioner dan Tuduhan Ketidaknetralan KPU

Hasil penelitian ini menemukan bahwa setidaknya terdapat 8 (delapan) jenis konten hoax yang masuk dalam kategori ancaman pada komisioner KPU dan tuduhan atas ketidaknetralannya di Pemilu 2019 yang telah penulis kumpulkan dan identifikasi. Konten hoax itu memiliki bentuk dan karakter yang beragam, namun secara umum masuk dalam kategori malinformasi dan disinformasi. Diantara konten hoax tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, konten hoax berkaitan dengan beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa adanya ancaman pembunuhan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila tidak memenangkan calon presiden Jokowi di Pemilu 2019. Konten hoax ini beredar luas di media sosial Facebook dalam bentuk foto dan narasi yang bernada ancaman dan menakuti penyelenggara pemilu, dimana dalam postingan tersebut disertai foto yang menjelaskan bahwa

Bupati Fakkak di Papua Barat meninggal dengan cara diracun karena berniat untuk membongkar kasus korupsi. Ini sebagaimana tertera pada Gambar 4.18 di bawah.

Gambar 4.18

Hoax Ancaman Pembunuhan pada Komisioner KPU



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Sebagaimana tertera pada foto di atas, konten hoax ini juga memberikan narasi terkait dengan meninggalnya mantan ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, pada 7 Juli 2016 karena diracun setelah berupaya membongkar skandal Pemilu 2014. Dari temuan penulis menunjukkan bahwa bentuk hoax yang beredar tersebut masuk dalam kategori

malinformasi, yaitu informasi yang disampaikan tidak saja palsu tetapi juga mengandung unsur terror, upaya menakut-nakuti, dan ancaman pada penyelenggara pemilu, karena ini tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Dimana fakta di lapangan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak adanya kasus pembunuhan terhadap bupati Fakkak, dan kematian mantan ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, bukan karena diracun tetapi karena sakit (Ramaputra 2018). Menurut penulis, konten hoax ini dibuat dan disebarakan untuk membangun diskursus di tengah-tengah masyarakat yang terpolarisasi bahwa seolah-olah di Pemilu 2019 ini pemerintah dan/atau orang-orang yang mendukung petahana sedang melakukan intervensi kepada KPU melalui cara-cara koersif untuk memenangkan pasangan kandidat Jokowi-Ma'ruf Amin. Artinya, tujuan di balik hoax ini ada dua, di satu sisi untuk mengancam dan meneror penyelenggara pemilu, di sisi lain untuk menurunkan popularitas dan elektabilitas petahana.

Kedua, konten hoax berkaitan dengan tuduhan bahwa KPU dengan sengaja tidak mencantumkan gelar pada pasangan kandidat 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno) di Pemilu 2019. Ini didasarkan pada iklan yang ditampilkan di Youtube resmi KPU berjudul 'Yuk Kenali Peserta Pemilu Serentak 2019', dan materi iklan serupa juga sudah lebih dahulu ada di situs KPU. Hal ini yang kemudian membuat sejumlah warganet mempersoalkan

video yang dibuat KPK tersebut. Ini seperti tertera pada Gambar 4.19 di bawah ini.

Gambar 4.19

Hoax Tuduhan KPU Sengaja Tidak Mencantumkan Gelar Paslon 02



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Terkait dengan konten hoax tersebut di atas, ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya hanya mengikuti formulir pendaftaran yang diisi oleh masing-masing calon. Selain itu, dari pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga memberikan pernyataan terhadap iklan KPU tersebut. Dimana mereka dengan sengaja tidak

mencantumkan gelar akademik ketika mengisi formulis pendaftaran (Nasution 2018).

Ketiga, konten hoax terkait adanya penyelenggara pemilu yang membuka aib sendiri dalam sebuah rapat. Konten hoax ini tersebar dalam bentuk video yang diberi narasi berikut: “Anggota Panwaslu dan KPU Buka Belang Lembaganya Dalam Forum Rapat.” Ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4.20 di bawah ini.

Gambar 4.20

Hoax Anggota KPU Buka Belang Lembaga



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Konten hoax yang disebarakan melalui media Youtube di atas telah banyak mendapatkan perhatian (*views*) dari

publik sebanyak 660 kali. Selain itu, hoax ini juga tersebar melalui media sosial Facebook dan cukup viral di Instagram dengan viewer mencapai 298.814. Berikut seperti tersaji pada Gambar 4.21 di bawah.

Gambar 4.21

Hoax Anggota KPU Buka Belang Lembaga di Instagram



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Besarnya viewer pada konten hoax yang disebarakan melalui media Youtube dan Instagram di atas, menjelaskan bahwa konten hoax yang diproduksi dengan judul bombastis terkait dengan penyelenggara pemilu cukup menarik perhatian publik di Indonesia. Fenomena ini dapat dimaknai ganda. Pertama, tingginya minat publik pada isu-isu hoax berkaitan dengan KPU ini menunjukkan adanya kesadaran

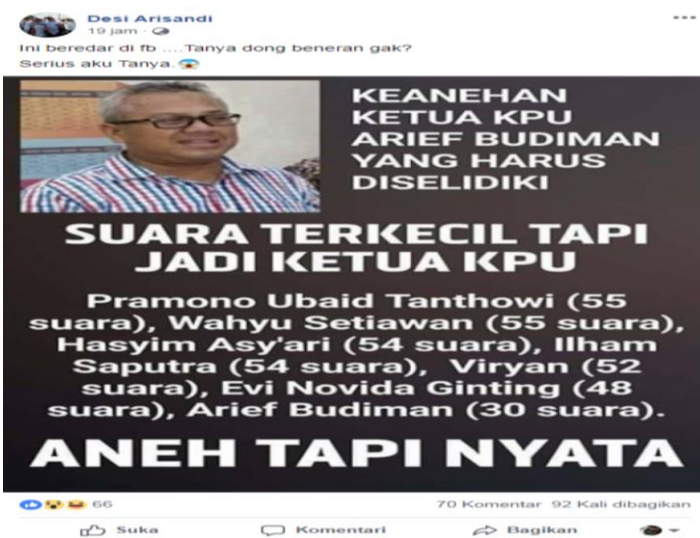
yang tinggi dari warga negara di Indonesia bahwa politik elektoral adalah bagian dari urusan mereka. Artinya, warga negara di Indonesia saat ini memiliki antusiasme tinggi untuk terlibat dalam urusan politik praktis, khususnya dalam politik elektoral. Kedua, sebaliknya, tingginya keterterikan pada publik dimungkinkan karena adanya kecurigaan yang tinggi pula pada institusi KPU yang tidak netral di pemilu 2019, karena maju kembalinya petahana dalam kontestasi memperebutkan kursi presiden Indonesia.

Sedangkan analisis penulis terhadap konten hoax di atas dapat dikategorikan ke dalam disinformasi, yaitu informasi yang disebarakan dengan diberi postingan video yang telah dimanipulasi untuk kepentingan menipu publik seolah penyelenggara pemilu memiliki moral yang buruk dan telah membuka kebobrokan yang ada dalam institusinya sendiri, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Fakta sesungguhnya tentang seseorang yang berbicara di video tersebut bukanlah anggota Panwaslu ataupun KPU, namun yang berbicara dalam video itu adalah Eva Dwiana, anggota DPRD Lampung, yang sedang membahas pelaksanaan Pilkada Lampung di bulan Juni 2018 (Sasmito 2019). Selain itu, menurut penulis bahwa produksi dan penyebaran konten hoax dalam bentuk video dan narasi ini dapat dipahami sebagai upaya delegitimasi institusi penyelenggara pemilu dengan cara membangun diskursus di ruang virtual seolah-olah lembaga penyelenggara pemilu tidak memiliki kredibilitas.

Keempat, hoax tentang tuduhan ketua KPU, Arief Budiman, terpilih walau dengan perolehan suara terkecil. Konten hoax ini beredar luas di media sosial Facebook dalam bentuk foto yang diberi narasi “keanehan ketua KPU Arief Budiman yang harus diselidiki. Suara terkecil tapi jadi ketua KPU.” Berikut lebih jelasnya dapat disimak pada Gambar 4.22 di bawah.

Gambar 4.22

Hoax Keterpilihan Arief Budiman Meskipun dengan Suara Sedikit



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Informasi hoax di atas diproduksi dan disebarakan untuk membangun wacana seolah ada kecacatan procedural dalam proses seleksi komisioner KPU RI, karena itu

meskipun Arief Budiman mendapatkan suara paling kecil tetap bisa menjadi komisioner dan sekaligus ketua KPU RI. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa suara yang dimaksud pada konten hoax di atas adalah hasil pemilihan komisioner KPU yang dilakukan oleh DPR. Sementara itu, pemilihan ketua KPU sendiri dilakukan dengan cara-cara musyawarah di antara tujuh anggota komisioner (Syafitrah 2019). Oleh karena itu, konten hoax ini dapat dikategorikan sebagai disinformasi, yaitu informasi yang disalahpahami, dipelintir, dan disertai rekayasa untuk menyesatkan publik dan membangun diskursus tersebut dalam rangka mendelegitimasi institusi penyelenggara pemilu.

Kelima, konten hoax berkaitan dengan tuduhan bahwa ketua KPU adalah saudara kandung Soe Hok Gie. Konten hoax ini beredar luas melalui saluran media sosial Facebook dalam bentuk unggahan foto Arief Budiman dengan seorang politisi PDI Perjuangan. Berikut ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4.23 di bawah.

Gambar 4.23

Hoax Tuduhan Ketua KPU Saudara Kandung Soe Hok Gie



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Dari analisis penulis bahwa konten hoax ini masuk dalam kategori malinformasi, karena mengandung pesan fitnah dan hasutan kebencian dengan menuduh tanpa bukti bahwa seolah ketua KPU adalah saudara Soe Hok Gie yang beretnis China. Faktanya, Arief Budiman yang merupakan saudara kandung Soe Hok Gie bukanlah yang saat ini sedang menjabat sebagai ketua KPU, melainkan aktivis dan demonstran angkatan 1966 dan pernah menjabat sebagai Guru Besar di Universitas Melbourne. Ini bukan rahasia

umum lagi, di kalangan pelajar, khususnya yang mengkaji ilmu sosial, sudah mafhum tentang ini. Namun demikian, hoax bentuk ini tetap menjadi isu yang viral di dunia maya. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.22 di atas bahwa konten hoax ini cukup viral dan menarik perhatian publik di Indonesia. Ini dapat diketahui bahwa sejak diambil tangkapan layar oleh Mafindo pada 8 Januari 2019, konten hoax tersebut telah dibagikan sebanyak 356 kali dan mendapatkan komentar 272 kali.

Kenam, konten hoax terkait dengan tuduhan insafnya anggota KPU berbuat kecurangan dan mengakui pernah dibayar tinggi. Konten hoax ini diberi judul “akhirnya ada anggota KPU yang insaf, mengaku di bayar 250 juta dan dijanjikan 12 M.” Konten hoax ini tersebar luas melalui saluran media sosial Facebook dalam bentuk video yang diberi narasi “Akhirnya ada Anggota KPU yang insaf, mengaku di bayar 250 juta dan dijanjikan 12 M. Saksikan wawancara eksklusifnya di MetroTV.” Ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4.24 di bawah ini.

Gambar 4.
24 Hoax Anggota KPU Insaf

mengaku di bayar 250 juta dan dijanjikan 12 M

April 30, 2019 · Adi Syafitrah · Fitnah / Hasut / Hoax · 0



Akhirnya ada Anggota KPU yang insaf, mengaku di bayar 250 juta dan dijanjikan 12 M.

50,427 views

800 41 SHARE SAVE ...

Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Dari penyelidikan penelitian ini ditemukan bahwa konten hoax ini masuk dalam kategori disinformasi, yaitu konten hoax yang diproduksi dengan memanipulasi video terlepas dari konteksnya. Berdasarkan analisis atas konten hoax tersebut ditemukan bahwa video yang diunggah oleh akun tersebut adalah potongan video dari program “Primetime News Metro TV” yang sudah ditayangkan sejak 06 Mei 2014 dan pengakuan ‘Mr.X’ di dalam video tersebut adalah upaya penyuapan terhadap penyelenggara pemilu terkait Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 yang

diselenggarakan pada 9 April 2014 (Syafitrah 2019). Adapun pesan utama yang hendak disampaikan di balik produksi dan penyebaran konten hoax tersebut adalah hendak membangun narasi bahwa ada anggota KPU di Indonesia yang insaf melakukan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara dan telah dibayar dalam sejumlah besar oleh oknum.

Ketujuh, konten hoax terkait ketua KPU RI sedang melakukan umroh bersama Jokowi. Konten hoax ini disebarluaskan secara luas melalui saluran media sosial Facebook dalam bentuk foto editan yang disertai narasi berikut: “aneh menjelang hari pemilu kok bisa-bisanya ketua KPU umroh bereng Jokowi? Padahal banyak masalah di KPU saat ini, terutama di KPLN. Bukankah ini pelanggaran?” (lihat Gambar 4.25). Dari hasil penyelidikan ada ketidaknyambungan antara foto dan narasi, karena orang yang ada di dalam foto yang memotret rombongan presiden umroh itu bukan lah ketua KPU, Arief Budiman, melainkan Unsil Habib, seorang penerjemah yang juga staf senior pada KBRI yang ada di Riyadh (Syafitrah 2019). Dengan demikian, hoax ini masuk dalam kategori disinformasi, yaitu informasi yang memiliki konten tidak benar.

Gambar 4.25
Hoax Ketua KPU Umroh Bersama Jokowi



Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Adapun tujuan dibalik produksi dan penyebaran konten hoax tersebut adalah untuk membangun narasi bahwa seolah-olah ketua KPU tidak bekerja di masa-masa pemilu yang membutuhkan perhatian dan peran-peran penting. Selain itu, pesan di balik konten hoax ini juga hendak membangun diskursus bahwa ada hubungan yang dekat antara ketua KPU dan Jokowi, sehingga ini dapat menjadi bukti bahwa ketua KPU tidak independen atau netral dalam

menjalankan tugasnya sebagai ketua KPU, institusi yang bertugas menyelenggarakan pemilu.

Delapan, hoax berkaitan dengan ketua KPUD Bekasi meninggal dunia disaat menjalankan tugasnya di Pemilu 2019. Konten hoax ini disebarakan melalui saluran media sosial Facebook dalam bentuk manipulasi foto yang diberi narasi berikut: “Innalillahi wainnailaihi rajiun. Ketua KPUD Bekasi meninggal dunia. #SaveDemocracy. 3) Innalillahi wa inna ilaihi roji’un, smoga khusnul khatimah aamiin. ketua KPUD bekasi ambruk saat rapat pleno, dan meninggal dunia setelah di rawat di puskesmas. #KorbanKedzalimanRezim” (lihat Gambar 4.26). Konten hoax dalam bentuk ini masuk kategori disinformasi, karena informasi yang disampaikan tidak benar dan salah. Fakta dilapangan pada saat itu menunjukkan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin, saat itu dalam kondisi sembuh sehat dan tidak meninggal dunia (Khoiri 2019).

Gambar 4.26
Hoax Ketua KPUD Bekasi Meninggal Dunia



nformasi yang menyebutkan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bekasi meninggal dunia merupakan informasi yang tidak benar. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan, kabar yang menyebut Ketua Komisi

Sumber: Mafindo dalam <https://turnbackhoax.id>

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa konten hoax tersebut hendak membangun narasi tentang ketidak profesionalan KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019, sehingga menimbulkan banyak korban. Hampir senada dengan beberapa konten hoax lain yang ditujukan untuk menyerang KPU di atas, bahwa konten hoax tentang kabar berita meninggalnya ketua KPUD Bekasi juga memiliki tujuan untuk menunjukkan pada publik bahwa kinerja KPU di pemilu 2019 menyimpan banyak masalah krusial. Dengan demikian dibayangkan kondisi ini dapat memperkuat gerakan yang berupaya untuk mendelegitimasi KPU di Pemilu 2019.

C. Motif dan Faktor Penyebab Masifnya Penyebaran Hoax

Pada bagian ini penulis hendak memberikan eksplorasi terkait dengan motif (atau tujuan) dan faktor-faktor yang menyebabkan konten hoax – terkait isu sosial politik, sara, dan secara khusus tentang KPU – diproduksi dan disebarluaskan secara luas di Indonesia, khususnya pada masa proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Pembahasan ini penting dieksplorasi guna memberikan pengetahuan komprehensif tentang akar masalah di balik masifnya penyebaran konten hoax di Indonesia dalam satu dekade terakhir, khususnya di masa proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Eksplorasi tentang persoalan ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini ke dalam dua bagian berikut.

C.1 Motif Produksi dan Penyebaran Hoax Secara Umum

Hasil penelitian ini menemukan bahwa motif produksi dan penyebaran konten hoax yang memanfaatkan jaringan internet memiliki banyak ragam. Secara umum diantara motif itu, yaitu: motif mendapatkan keuntungan finansial atau *bussines oriented*, motif politik kekuasaan, motif ideology, motif kebencian, motif sosial, dan motif kesenangan (iseng). Dari keenam motif itu, motif yang pertama dan kedua mendominasi latar belakang masifnya

produksi penyebaran hoax di Indonesia pada masa pemilu 2019 (wawancara, Farid Zamroni, 20 September 2019). Penjelasan dari beragam motif ini disajikan di bawah ini.

Pertama, adalah motif finansial atau *bussines oriented*. Artinya, konten hoax diproduksi dan disebarakan oleh seorang buzzer dilakukan karena ada pihak-pihak yang dengan sengaja memesan untuk kepentingan tertentu dengan memberikan sejumlah uang yang besar. Ini seperti kasus terbongkarnya sindikat Saracen, yaitu sekelompok orang yang menebarkan berita hoax terkait isu SARA di media sosial berdasarkan pesanan. Aktifitas ini dilakukan secara terorganisir, di mana untuk menebarkan ribuan konten hoax pada kasus Saracen ini, produsen menggunakan banyak grup facebook, diantaranya Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com untuk menggalang lebih dari delapan ratus ribu akun (BBC News, 24 Agustus 2017).

Selain itu, keuntungan uang dari memproduksi dan menyebarkan konten hoax selain didapatkan dari oknum yang memesan, juga bisa didapatkan melalui Google Adsense. Keuntungan finansial dari Google Adsense ini akan didapatkan ketika konten-konten hoax yang disebarakan melalui media sosial ataupun portal media yang sudah terdaftar pada aplikasi tersebut, kemudian mendapatkan banyak respon dari netizen baik dalam bentuk *viewers, like, and share* maka secara otomatis pemilik akun tersebut akan mendapatkan keuntungan finansial dari Google.

Kedua, adalah motif persoalan politik kekuasaan. Konten hoax diproduksi dan disebar, khususnya di masa pemilu, dengan tujuan bukan untuk mendapatkan uang saja, melainkan untuk kepentingan politik kekuasaan. Hoax bentuk ini biasanya diproduksi oleh individu atau sekelompok orang yang menjadi tim sukses atau simpatisan kandidat untuk menyerang dan menjatuhkan popularitas lawan politik di satu sisi, dan di sisi lain meningkatkan popularitas kandidat yang didukung. Ini umumnya terjadi di Indonesia sebelum Pemilu 2019. Namun, pengalaman di pemilu 2019 konten hoax yang diproduksi dan disebar untuk tujuan politik lebih banyak untuk saling menjatuhkan lawan politik masing-masing, dan saling serang di antara pendukung (FGD, 30 September 2019). Fanatisme pada seorang figure atau pilihan politiknya yang paling benar, juga mendorong seseorang untuk menebarkan informasi hoax dengan maksud mempengaruhi pandangan dan pilihan politik seseorang. Tidak jarang hoax disebar oleh seorang politisi partai politik untuk tujuan mempengaruhi publik dan sekaligus membuat propaganda politik. Dalam kondisi masyarakat yang terpolarisasi secara politik dan sosial seperti di Indonesia saat ini, cara-cara ini banyak digunakan oleh para politisi partai dan tokoh publik untuk tujuan ini.

Ketiga, adalah motif ideologi. Konten hoax diproduksi dan disebar untuk mengkonter pandangan atau ideologi kelompok lain. Hoax jenis ini lazim membawa isu soal agama yang digunakan untuk membangun diskursus di ruang

virtual guna menandingi gagasan-gagasan yang diusung kelompok masyarakat lain. Isu radikalisme dan komunisme di antara isu yang sering dijadikan komoditi memproduksi konten hoax ketegori ini, yang disebarkan melalui saluran media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta melalui aplikasi WhatsApp.

Keempat, adalah motif kebencian pada seorang figure, kelompok masyarakat yang beda pandangan agama dan politik, dan institusi. Motif ini acap kali mendorong seseorang untuk menebarkan konten hoax pada seseorang yang memiliki pandangan politik dan agama yang berbeda. Terpolarisasinya masyarakat pada dua dukungan kandidat presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019 yang populer disebut kelompok kecebong dan kampret memicu lahirnya kebencian itu. Kondisi ini yang kemudian mendorong kedua kelompok itu untuk saling serang dengan beragam isu sosial politik dan agama di ruang virtual, yang tidak jarang merupakan informasi hoax.

Kelima, adalah motif sosial, dimana seseorang menyebarkan hoax agar dinilai menjadi orang yang lebih maju dan kaya informasi, namun lazimnya mereka tidak mengetahui isi yang disampaikan hoax tersebut mengandung kebenaran atau informasi palsu. Karena itu, informasi apapun yang terkesan bagus dan menarik akan secepat mungkin dibagikan ke orang lain. Ini yang sering kali tanpa sadar membuat seseorang akan menyebarkan informasi yang didapat melalui media sosial atau aplikasi chatting seperti

WhatsApp ke orang lain. ***Keenam***, adalah motif kesenangan dan iseng. Dimana seorang individu menyebarkan konten hoax hanya untuk sekedar iseng dan/atau mencari kesenangan sesaat saja ketika melihat konten hoax yang dia *share* mendapatkan komen dan *like* dari warga netizen lain.

Terkait dua motif penyebaran hoax di atas, Prof. Henri Subiakto, Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Kominfo, menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak sadar jika kebiasaan mereka menebarkan konten hoax karena motif sosial dan iseng tersebut di atas telah dimanfaatkan oleh produsen hoax dan sengaja menciptakannya untuk kepentingan politik dan ekonomi. Problemnya lagi orang yang percaya dan ikut menyebarkan hoax di Indonesia jumlahnya cukup banyak, dan ini menurutnya dapat mengancam integritas bangsa Indonesia (Sumardi 2019).

Beragam motif di atas, dan mungkin masih ada motif lain, yang banyak mendorong masyarakat Indonesia khususnya selama proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019 untuk memproduksi dan menebarkan informasi yang mengandung konten hoax. Kondisi ini yang memungkinkan juga terjadi pada produksi dan penyebaran konten hoax yang menyerang penyelenggara pemilu. Terkait hal ini dijelaskan pada pembahasan di bawah.

C.2 Motif Penyebaran Hoax untuk Menyerang KPU

Dari enam motif di balik produksi dan penyebaran konten hoax secara umum seperti telah di jelaskan di atas, motif konten hoax yang diproduksi dan disebarakan untuk menyerang KPU di masa pemilu 2019 masuk dalam kategori motif politik kekuasaan dengan beragam variasi. Ini penulis dapatkan dari hasil analisis terhadap konten-konten hoax yang khusus ditujukan untuk menyerang KPU di Pemilu 2019 yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan hasil wawancara mendalam dengan para informan. Adapun diantara ragam variasi motif atau tujuan di balik serangan hoax terhadap KPU di Pemilu 2019, baik pada institusi maupun pada aktor yang ada di dalamnya (para komesioner) adalah sebagai berikut.

Pertama, hoax diproduksi dan disebarakan dengan motif mendelegitimasi institusi KPU di Pemilu 2019. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konten hoax yang dibuat untuk motif delegitimasi institusi penyelenggara pemilu adalah yang paling banyak. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hoax kategori ini dapat ditemukan dalam bentuk yang sangat beragam, mulai dari isu terkait dengan adanya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tangjung Priok, mobilisasi dan pengarahan orang-orang China untuk mencoblos kandidat petahana pada TPS tertentu, sampai dengan hoax tentang adanya ancaman pembunuhan jika

KPU tidak memenangkan Jokowi sebagai kandidat petahana di Pemilu 2019. Kerena itu, menurut penulis bahwa ini adalah motif utama di balik masifnya penyebaran konten hoax untuk menyerang KPU di Pemilu 2019.

Banyaknya ragam hoax yang disebarakan dengan motif delegitimasi KPU ini dilakukan untuk membangun diskursus bahwa KPU adalah lembaga yang tidak kredibel, tidak dapat dipercaya, partisan, dan tidak otonom dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mempengaruhi publik agar memiliki kepercayaan yang rendah kepada KPU dan menolak hasil Pemilu 2019. Harapannya hasil KPU pada saat itu yang memenangkan kandidat petahana dapat digugat di Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dilakukan pemungutan suara ulang atas hasil pemilu yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai kandidat petahana di Pemilu 2019.

Kedua, hoax diproduksi dan disebarakan untuk tujuan menyerang KPU dalam rangka membangun diskursus bahwa institusi KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pemilu serentak di 2019. Menurut analisis penulis pada data penelitian menunjukkan bahwa upaya membangun diskursus tentang ketidakprofesionalan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2019 ini merupakan langkah awal untuk memastikan tujuan delegitimasi pada institusi KPU dapat diwujudkan, meskipun semua gagal dicapai.

Ketiga, hoax diproduksi dan disebarakan untuk tujuan menyerang KPU dalam rangka membuat propaganda dan meresahkan warga untuk menggoyang tatanan sosial-politik yang ada. Kondisi masyarakat yang terpolarisasi ke dalam dua kubu (dengan istilah buruk yang digunakan Kecebong dan Kampret), atau kubu nasionalis pluralis dan kubu populis radikan/kanan memberi peluang emas bagi produsen hoax untuk semakin memperuncing polarisasi itu agar menimbulkan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat), bahkan konflik vertikal (antara massa v.s negara). Ini dilakukan untuk menciptakan kondisi politik agar menjadi caos, yang seolah-olah salah satu penyebab utamanya adalah karena adanya persoalan-persoalan dalam tubuh KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Harapannya proses delegitimasi KPU diharapkan bisa semakin terwujud dan hasil pemilu menjadi tidak sah. Menurut penulis motif penyebaran hoax yang ditujukan pada KPU ini adalah yang sangat berbahaya. Karena itu, kedepan penanggulangan atas serangan hoax yang ditujukan ke KPU semacam ini pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada ke depan yang sangat perlu diantisipasi.

Keempat, hoax diproduksi dan disebarakan untuk tujuan menyerang KPU dalam rangka melakukan intimidasi dan teror pada penyelenggara pemilu. Motif ini terkesan diciptakan guna membangun kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan pada diri para komisioner KPU. Namun, dibalik itu, produksi dan penyebar hoax yang disengaja itu justru

hendak membangun diskursus untuk mempengaruhi publik agar memiliki pandangan dan keyakinan bahwa ada presser dan penggunaan kekuasaan oleh negara yang memaksa KPU untuk memenangkan kandidat petahanya, yaitu pasangan kandidat nomor 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Hoax semacam ini, salah satunya, bisa ditemukan seperti bentuk hoax tentang ancaman pembunuhan pada komisioner KPU jika tidak memenangkan Jokowi di Pemilu 2019 (lihat Gambar 4.18).

Kelima, hoax diproduksi dan disebarakan untuk menyerang KPU dilandasi oleh motif kebencian pada institusi dan komisioner KPU, karena dinilai berpihak pada salah satu kandidat. Motif ini dapat dilihat dari sebagian besar bentuk-bentuk hoax yang diproduksi untuk menyerang personal-personal KPU, khususnya pada konten-konten hoax yang ditujukan pada ketua KPU RI, Arief Budiman.

C.3 Faktor-Faktor Penyebab Masifnya Penyebaran Hoax

Masifnya penyebaran konten hoax di Indonesia dalam satu dekade terakhir disebabkan oleh beberapa kondisi yang menjadi faktor pengaruh. Diantaranya kondisi itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, salah satu faktor yang membuat masifnya penyebaran konten hoax adalah frekuensi akses masyarakat Indonesia pada internet, khususnya akses mereka pada penggunaan media sosial (seperti Facebook dan

Twitter) dan aplikasi *chatting* WhatsApp. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Indonesia adalah termasuk salah satu negara di dunia yang cukup tinggi konsumsi internet dan media sosial, khususnya pada masyarakat yang tinggal di wilayah urban. Terkait hal ini, survei yang dilakukan LIPI di Sembilan provinsi menemukan bahwa semakin tinggi akses masyarakat pada internet berkontribusi pada tingginya penyebaran hoax. Begitu juga masyarakat yang tinggal di wilayah urban lebih banyak mengkonsumsi internet dan menyebarkan hoax, dibanding dengan mereka yang tinggal di wilayah rural/pedesaan. Survey ini menemukan bahwa Banten (80,5 persen), DKI Jakarta (70 persen), dan Jawa Barat (67 persen) adalah diantara wilayah yang paling banyak menyebarkan konten hoax di Pemilu 2019. Ini misalnya berkaitan dengan hoax tentang keberadaan buruh China di Indonesia yang masif tersebar di masa Pemilu 2019. Sedangkan Jawa Tengah masuk sebagai daerah yang relatif tidak terlalu tinggi, yaitu 47,2 persen, apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di pulau Jawa (Nadzir, Seftiani, & Permana 2019: 5). Menurut penulis, ini juga yang menjadi faktor penyebab mengapa di Jawa Tengah tidak banyak ditemukan konten-konten hoax yang disebarkan untuk menyerang KPU setempat, baik KPU di level provinsi maupun di level kabupaten/kota.

Kedua, masifnya penyebaran hoax di Indonesia juga disebabkan oleh faktor rendahnya literasi digital pada masyarakat generasi Baby Boomers atau generasi tua.

sebagian besar informan yang penulis wawancara juga berpendapat bahwa masifnya dan cepatnya penyebaran hoax melalui media sosial dan aplikasi chatting WhatsApp di Indonesia memiliki kaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia secara umum, khususnya generasi tua (wawancara, informan, Oktober 2019). Temuan penelitian ini juga senada dengan hasil survei yang dilakukan Kominfo di 2018 yang menemukan bahwa generasi tua berumur 45 tahun ke atas rata-rata memiliki pengetahuan literasi digital yang rendah, dan karenanya banyak menyebarkan berita hoax. Menurut hasil survei ini kalangan ibu-ibu adalah yang paling banyak menyebarkan hoax, karena kebanyakan mereka mudah mengshare informasi yang didapatkan ke teman/publik melalui media sosial dan aplikasi chatting WhatsApp tanpa terlebih dahulu membaca dengan tuntas dan mencermati apakah informasi itu benar atau salah (Kominfo, 2018).

Masifnya penyebaran hoax di Indonesia selain dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital tersebut, juga diperparah dengan kondisi literasi politik masyarakat yang masih rendah. Merujuk pada Dever dan Hands (1990, dalam Karim, dkk. 2015) bahwa literasi politik di sini dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang proses politik dan isu-isu politik sebagai bentuk kesadaran diri sebagai warga negara. Literasi politik yang rendah ini yang kemudian semakin memperparah penyebaran hoax melalui media sosial maupun aplikasi chatting seperti

WhatsApp di Pemilu 2019. Bahkan pada kelas masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan terdidik dalam tradisi keserjanaan universitas sekalipun juga banyak yang terpapar hoax dan ikut serta menyebarkannya. Ini artinya, tempat tinggal di wilayah perkotaan dan terdidik tidak memberikan jaminan bahwa seseorang memiliki pengetahuan literasi politik yang baik. Terkait hal ini, survey LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di 2019 menemukan bahwa lebih dari 50 persen masyarakat yang tinggal di perkotaan dan berpendidikan tinggi terpapar konten hoax dan ikut serta menjadi orang yang menyebarkannya di Pemilu 2019 (Nadzir, Seftiani, & Permana 2019).

Dari sini jelas, bahwa salah satu faktor masifnya penyebaran hoax di Indonesia, khususnya di masa Pemilu 2019, memiliki kaitan erat dengan derasnya arus informasi melalui jejaring internet tidak dibarengi dengan kualitas pengetahuan literasi digital dan literasi politik publik. Oleh karena itu, pendidikan literasi politik penting ditanamkan ke publik sebagai bentuk melawan penyebaran konten hoax secara masif yang mungkin terjadi kembali di Pemilu dan Pilkada mendatang. Pengetahuan literasi digital dan politik masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kualitas demokrasi di Indonesia tidak dihancurkan oleh dampak buruk yang dihasilkan dari masifnya produksi dan penyebaran konten hoax. Singkatnya, arus deras penyebaran hoax ini menjadi ujian bagi demokrasi di Indonesia, dan ia dapat merusak demokrasi itu sendiri. Salah satu cara untuk

mencegahnya adalah dengan pendididika literasi politik yang penting ditanamkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

Ketiga, masifnya penyebaran hoax di Indonesia pada momen-momen politik elektoral juga dipengaruhi oleh kurang tegasnya negara pada perusahaan platform sosial media (seperti Facebook dan Twitter) yang ada di Indonesia. Menurut penjelasan informan penelitian ini menjelaskan bahwa selama ini negara kurang tegas dan serius meminta pertanggungjawaban pada perusahaan Platform media sosial yang secara masif digunakan untuk menyebarkan konten hoax di Indonesia. Di masa Pemilu 2019, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ribuan konten hoax yang disebarakan melalui media sosial, namun negara juga membearkan saja itu tersebar dan tidak menindak tegas perusahaan platform. Ini karena di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur perusahaan platfor terkait dengan konten-konten seperti apa yang dapat atau dibolehkan disebarakan di media sosial. Seharusnya, negara perlu membuat aturan terkait ini, khususnya menutup akun-akun yang banyak menyebarkan konten-konten hoax. Perusahaan platform yang hidup di Indonesia harus diberikan tugas untuk ikut menjaga bangsa ini agar tetap utuh dan terjaga dari virus-virus yang mengancam integrasi bangsa seperti hoax itu, bukan hanya sekedar menumpang pengembangan bisnis semata.

Keempat, masifnya penyebaran konten hoax juga disebabkan kurang optimalnya pemerintah, khususnya KPU dan Bawaslu, dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Temuan penelitian ini menemukan bahwa selama ini pendidikan politik, kampanye publik, dan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu ke publik, baik pada komunitas masyarakat maupun pada kalangan pemilih milenial di kampus, lebih banyak memberikan transformasi pengetahuan terkait tahapan dan prosedur pelaksanaan Pemilu dan adanya ancaman praktik politik uang, serta kecurangan. Sedangkan transformasi pengetahuan yang secara khusus didesain untuk menghalau serangan hoax tidak banyak diberikan ke publik, kecuali sambil lalu diselipkan dalam kegiatan sosialisasi atau kampanye publik tersebut. Bahkan KPU di wilayah Jawa Tengah sudah pula membentuk relawan demokrasi sebanyak 55 orang di setiap daerah yang tersebar di 35 kabupaten/kota pada Pemilu serentak 2019. Namun sayangnya, relawan demokrasi ini juga lebih banyak bekerja untuk memberikan pendidikan politik dan/atau sosialisasi ke publik terkait tahapan pemilu.

D. Dampak Serangan Hoax pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Jawa Tengah

Pada pemilu serentak 2019 banyak kategori dan bentuk konten hoax yang diproduksi dan disebarkan secara masif

melalui saluran media sosial, portal media, dan aplikasi chatting WhatsApp yang ditujukan untuk menyerang KPU, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun, hasil penelitian penulis tidak banyak dari serangan konten hoax tersebut yang memiliki dampak langsung pada tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di wilayah Jawa Tengah. Hanya ada beberapa bentuk hoax yang memiliki dampak besar pada tahapan pelaksanaan pemilu. Sedangkan secara umum serangan hoax itu hanya berdampak luar (atau tidak langsung) bagi KPU di wilayah Jawa Tengah, baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini berbeda dengan dampak hoax di level nasional, dimana serangan hoax yang ditujukan menyerang KPU berdampak pada proses pelaksanaan pemilu (institusional) dan psikologis penyelenggara pemilu. Bahkan karena ini, telah membuat komisioner di KPU RI tidak saja disibukkan untuk memberikan klarifikasi ke publik dan melakukan counter opini di media virtual, namun juga sampai pada usaha-usaha pelaporan pemproduksi dan penyebar hoax pertama ke pihak penegak hukum/kepolisian.

Lebih lanjut, secara institusional, penelitian ini menemukan bahwa di level lokal serangan hoax yang ditujukan ke KPU tidak terlalu berdampak signifikan dan langsung pada tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, karena mayoritas hoax ditujukan pada KPU RI. Sedangkan KPU di level lokal, provinsi maupun kabupaten/kota, secara umum hanya terkena dampak luar atau tidak langsung, seperti:

sedikit panik dan mencari klarifikasi pada institusi KPU lebih tinggi, ikut direpotkan memberi klarifikasi pd publik melalui media sosial, WhatsApp, dan rilis berita.

Namun, pengecualian bagi hoax tentang bolehnya mencoblos dengan menggunakan E-KTP di TPS mana saja bagi warga negara yang tidak memiliki surat undangan mencoblos, yaitu Formulir C6, dan/atau surat pindah memilih, yaitu Formuli A5, yang tersebar luas di masyarakat melalui jaringan media sosial dan WhatsApp. Hoax bentuk ini memiliki dampak luas pada pelaksanaan pemungutan suara di banyak tempat di Jawa Tengah. Di antara dampaknya yang besar adalah dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 21 Tempat. Pelaksanaan PSU ini disebabkan pengaruh hoax yang menyebabkan banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk memilih di 21 TPS itu ikut mencoblos, karena hoax tersebut. Padahal informasi yang sebenarnya adalah dibolehkannya menggunakan E-KTP untuk memberikan suara di Pemilu serentak 2019 pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu identitas tersebut. Itu pun pemilih harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke panitia pemilihan satu jam sebelum waktu pemilihan berakhir. Terkait masalah ini, banyak narasumber dari komisioner KPU di wilayah kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang penulis wawancara menjelaskan bahwa PSU itu dilakukan karena dampak hoax berpengaruh pada terbangunnya pemahaman yang berbeda antara petugas pelaksana pemungutan suara dan pengawan di TPS

bersangkutan. Dimana yang pertama melarang orang untuk memilih hanya berbekal E-KTP, sedangkan yang kedua mengizinkan. Kemudian di sebagian tempat PSU dilakukan juga karena panitia pemungutan suara dan pengawas sama-sama termakan hoax tersebut, sehingga mengizinkan pemilih untuk mencoblos asalkan membawa E-KTP meskipun mereka tidak terdaftar, tidak memiliki Formulir A5, dan tidak berasal dari wilayah tempat pemungutan suara itu dilakukan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan dampak masifnya penyebaran konten hoax di Pemilu 2019 pada kondisi sosial masyarakat. Diantara dampak itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, hoax telah berpengaruh membentuk masyarakat terpolarisasi secara sosial dan politik. Dimana kondisi masyarakat yang terpecah karena perbedaan pilihan politik, antara yang memilih Jokowi dan Prabowo, dan yang dikenal dengan istilah Cebong dan Kampret, semakin terpolarisasi akibat masifnya konten hoax yang sengaja diproduksi dan disebar untuk saling menjatuhkan.

Kedua, hoax juga telah menciptakan kegaduhan dan kepanikan warga dalam menghadapi Pemilu serentak 2019. Bahkan konflik vertika antara mass dan aparat keamanan yang terjadi di Jakarta dan di banyak daerah, seperti Makasar dan Sumatra, setelah proses rekapitulasi selesai di Mei 2019 juga banyak dipengaruhi oleh hoax. *Ketiga*, penyebaran hoax juga berpengaruh pada lahirnya praktik persekusi dan konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Artinya, hoax

mengganggu kerukunan masyarakat. Berdasarkan survei Masetel di 2019 terdapat 81, 90 persen publik setuju bahwa hoax di masa Pemilu 2019 telah mengganggu kerukunan dan harmoni masyarakat di Indonesia, bahkan sesama umat Muslim sekali pun (Mastel 2019).

Keempat, masifnya penyebaran konten hoax di masa-masa pemilu telah berdampak menghambat pembangunan ekonomi. Berdasarkan survei Mastel di 2019 juga menemukan terdapat sebanyak 76, 40 persen publik setuju tentang ini. Kelima, masifnya penyebaran konten hoax, baik yang ditujukan untuk menyerang antar kandidat, pendukung kandidat, maupun KPU, juga dinilai banyak narasumber penelitian dapat mengganggu proses demokratisasi di Indonesia (wawancara, informas, Oktober-November 2019). Temun ini juga senada dengan hasil penelitian LIPI di 2019 yang menemukan bahwa masifnya penyebaran hoax di Indonesia telah menghambat proses pembangunan politik dan konsolidasi demokrasi (Nadzir, Seftiani, & Permana, 2019). Namun, menurut penulis kondisi ini masih perlu diuji kembali dengan kajian yang mendalam.

E. Strategi KPU dalam Menghadapi Serangan Hoax pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah

Strategi KPU di Jawa Tengah dalam mencegah dan menghadapi serangan hoax di Pemilu serentak 2019 cukup beragam. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa ada

lima strategi yang telah diambil KPU di Jawa Tengah dalam mencegah maupun menangkal serangan hoax, di antara strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, karena pengalamannya menghadapi hoax di Pilkada Gubernur 2018, KPU di Jawa Tengah di masa Pemilu serentak 2019 ini membangun relasi dan jejaring dengan sejumlah lembaga untuk bersama-sama mengampanyekan terkait dengan bahayanya hoax dan adanya ancaman hoax. Diantara lembaga itu adalah: Mafindo Jawa Tengah, Kominfo Jawa Tengah, Diskrimisus Polda Jawa Tengah, dan Netizen dan Blogger di Jawa Tengah.

Kedua, untuk mencegah dan menghadapi serangan hoax di Pemilu 2019, penyelenggara KPU membuat dan mengshare informasi tentang tahapan pemilu pada seluruh Media Platform yang dimiliki KPU Propinsi dan 35 KPU di Kab/Kota di Jawa Tengah.

Ketiga, KPU Jawa Tengah melakukan sosialisasi terkait tahapan pemilu dan pendidikan politik dengan cerdas di komunitas masyarakat dan di kampus-kampus (KPU goes to Kampus). Namun, sayangnya pada kegiatan ini belum banyak muatan pengetahuan yang coba ditransfer ke publik terkait bahaya hoax dan adanya ancaman hoax di Pemilu 2019.

Keempat, KPU di Jawa Tengah membentuk relawan demokrasi sebanyak 55 orang di setiap kabupaten/kota untuk 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Namun sayangnya, keberadaan relawan demokrasi ini lebih banyak

pada penguatan materi tahapan dan prosedur Pemilu 2019, dibandingkan memberikan materi terkait hoax.

Kelima, untuk menghadapi serangan hoax, KPU di Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan KPU yang ada di semua level. Kemudian, memberikan klarifikasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran media sosial, aplikasi *chatting* seperti WhatsApp, dan membuat rilis berita atau informasi hoax ke portal web & media center KPU, dan media masa.

Di atas adalah sejumlah langkah dan strategi yang dilakukan KPU di Jawa Tengah dalam rangka mencegah dan menghadapi serangan hoax. Menurut analisis penulis, meskipun strategi di atas masih kurang optimal dan memadai untuk menangkal serangan hoax, namun sudah bekerja relatif baik. Ini setidaknya ditandai dengan tidak banyaknya serangan hoax yang ditujukan pada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, yang ada di wilayah Jawa Tengah, bila dibandingkan dengan penyelenggara pemilu di tempat lain, seperti di Jawa Timur, Meda, Makasar, dan Jakarta.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dinarasikan cukup panjang pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan kedalam poin-poin penting di bawah ini.

- 1) Produksi dan penyebaran hoax di Pemilu 2019, secara umum, banyak ditujukan untuk saling saling menjatuhkan lawan politik masing-masing, dan saling serang di antara pendukung.
- 2) Hoax yang menyerang penyelenggara pemilu 2019 lebih banyak ditujukan untuk KPU RI, dibandingkan KPU di daerah. Di Jawa Tengah sendiri tidak banyak yang dibuat dan disebar untuk menyerang KPU setempat di Pemilu 2019.
- 3) Akar masalah utama di balik masifnya penyebaran hoax di Pemilu 2019 tidak dapat dilepaskan dari banyak faktor, mulai dari rendahnya literasi digital dan literasi politik warga yang tidak berbanding lurus dengan meningkatnya frekuensi warga dalam mengakses internet dan media sosial, kurang tegasnya negara pada perusahaan platform, sampai pada kurang optimalnya pemerintah dan khususnya

- penyelenggara pemilu dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada warga.
- 4) Serangan hoax hanya memiliki dampak luar terhadap KPU di Jawa Tengah, dibandingkan terhadap KPU RI. Namun, pengecualian pada konten hoax “mencoblos cukup pakai E-KTP” memiliki dampak besar pada tahapan pemilu.
 - 5) Strategi KPU di Jateng sudah relatif cukup baik menangkal hoax berkat pengalaman Pilkada 2018, namun di tingkat nasional masih menunjukkan kurang sigapnya KPU RI dan pemerintah terhadap ancaman hoax di Pemilu 2019.

B. Rekomendasi Kebijakan

Ada enam rekomendasi kebijakan yang dapat ditawarkan kepada pemerintah, KPU, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah penyebaran hoax di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- 1) Memberikan literasi digital dan literasi politik ke pada masyarakat. Literasi digital dibutuhkan warga untuk membantu individu dan keluarga agar dapat melindungi dirinya sendiri dari konten dan komunikasi yang tidak diinginkan di dunia digital. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara berikut: (1) mendesain program pendidikan dan sosialisasi ke masyarakat yang khusus untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam memilih, memilah, memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi informasi yang didapat dan diakses melalui internet (media sosial, portal media, dan aplikasi chatting seperti WhatsApp). Ada delapan komponen literasi digital yang dapat ditransformasi ke public, yaitu: *Functional Skill and Beyond, Creativity, Collaboration, Communication, The Ability to Find and Select Information, Critical Thinking and Evaluation, Cultural and Social Understanding, dan E-Safety.* (2) Memasukkan metode berpikir kritis (critical thinking) dan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan guna mengembangkan kapasitas dalam mengevaluasi informasi.

- 2) Mengembangkan info grafis yang lebih sederhana, singkat, dan komprehensif terkait dengan tata cara pemilu dan bahaya hoax. Ini disebarakan secara masif melalui media center KPU, media sosial, dan aplikasi chating WhatsApp individu dan grup.
- 3) Optimalisasi dan perkuat kerjasama dengan pihak kepolisian, kominfo, dan seluruh stakeholder , serta pelibatan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja pencegahan dan penangkalan penyebaran hoax.
- 4) Pemerintah harus mengambil sikap tegas dan lebih kooperatif pada perusahaan platform media sosial untuk tidak membiarkan hoax bertebaran bebas.

- 5) Perkuat dan optimalisasi keberadaan relawan demokrasi yang sudah dibentuk KPU Jateng di setiap kabupaten/kota untuk bekerja tidak hanya memberikan sosialisasi tentang tahapan dan prosedur pemilu/pilkada, namun juga memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang hoax. Karenanya perlu pemberian worksho/pelatihan khusus pada para relawan demokrasi.
- 6) KPU perlu membangun dan memiliki SDM yang berkualitas di bidang humas dan IT untuk dapat membentuk tim media sosial dan cyber army yang handal untuk secara masif memberikan sosialisasi pada masyarakat dan penangkalan hoax yang beradar di ruang virtual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon A. 2014, Indonesian's Presidential Social Media Campaigns, article was presented in Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 22 September 2014.
- Ali-Fauzi, Ihsan, dkk. (2019). Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian. Jakarta: PUSAD dan MAFINDO.
- Allcott, Hunt & Matthew Gentzkow. (2017). *Social Media and Fake News in the 2016 Election*. Journal of Economic Perspectives, Volume 31, Number 2: 211-236.
- APJII. 2019. Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet di Indonesia 2018. Diakses dari <https://apjii.or.id/survei>
- Ayu, Rina. (2019). Ini Deretan Hoax Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019. Tribunnew.com, 13 April 2019. Diakses dari <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/04/13/ini-deretan-hoax-pada-penyelenggaraan-pemilu-2019?>
- Bayu, Dimas Jarot. 2018. Mafindo Catat Hoax Politik Merajalela Jelang Pilpres 2019. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2018/10/16/mafindo-catat-hoax-politik-merajalela-jelang-pilpres-2019>

- Bergmann, Eirikur. (2018). *Conspiracy and Populism: The Politics of Misinformation*. Cham: Pgrave Macmillan.
- Budiharto, W. & Meiliana, M. 2018, Prediction and analysis of Indonesia Presidential election from Twitter using sentiment analysis, *Journal of Big Data*, Vol 5, accessed from <https://doi.org/10.1186/s40537-018-0164-1>
- Chen, Y., Conroy, N. J., & Rubin, V. L. (2015). *News in an Online world: The Need for an “Automatic Crap Detector”*. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 52(1), 1-4. Doi:10.1002/pra2.2015.145052010081
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd Edition, London: SAGE Publications.
- Fontana, Andrea & James H. Frey. (2009). Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan, dalam Nurman K. Denzin & Tvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. (1973). *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. New York: Vintage.
- Foucault, Michel. (1976). *The Archaeology of Knowledge and the Discourse of Language*. New York: Harper Colophon.

- George, Cherian. 2016. *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. Singapore: The MIT Press.
- Hendrarso, Emy Susanti. (2008). 'Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar', dalam Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Irawanto, B. 2018, Political Machinery or Women's Network?: The Case of East Java's 2018 Gubernatorial Election, Perspective, No.65, Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Karim, Abdul Gaffar dkk. 2015. Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman. Laporan Penelitian, JPP FISIPOL UGM dan KPU Kabupaten Sleman.
- Kemkominfo. 2019. Hanya Cukup Punya E-KTP Saja. Diakses dari <https://stophoax.id/blog/post/disinformasi-hanya-cukup-punya-e-ktp-saja#>
- Khiril, Muhammad. 2018. KPU Lakukan Voting Pemilihan Capres Melalui Facebook. Diakses dari <https://turnbackhoax.id/2018/09/09/salah-kpu-lakukan-voting-pemilihan-capres-melalui-facebook/>
- Kuklinski, James H., at al. (2000). Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship. *The Journal of Politics*, Volume 63, Number 3, 790-816.

- Kusman, A. P. (2017, January 19). *Hoaxes and fake News: a Cancer on Indonesian Democracy*. Indonesia at Melbourne. Diakses dari <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/hoaxes-and-fake-news-a-cancer-on-indonesian-democracy/>
- MacDougall, CD. (1958). *Hoaxes*. New York: Dover Publications.
- Maharani, Tsarina. 2019. Kominfo Identifikasi 486 Hoax Sepanjang April 2019, 209 Terkait Politik. Detiknews.com, 1 Mei. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-hoax-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik>
- Marsh, David & Gerry Stoker. (2010). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
- MASTEL. (2017). Infografis Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Diakses dari <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>
- MASTEL. (2019). Hasil Survei Wabah Hoax Nasional. Diakses dari <http://mastel.id/hasil-survei-wabah-hoax-nasional-2019/>
- Mastel. 2019. Hasil Survei Wabah Hoax Nasional. Diakses dari <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Monsees, Linda. (2018). *The Politics of Fake News – On Fake News as a Collective Symbol*. Paper dipresentasikan pada acara “ The Internet, Policy & Politics Conference 2018, Oxford.”
- Nadzir, Ibnu, Sari Seftiani & Yogi Setya Permana. (2019). *Hoax and Misinformation in Indonesia: Insights from a National Survey*. Perspective, ISEAS Yusof Ishak Institute, 5 November.
- Purbaya, Angling Adhitya. (2019). Gara-Gara Hoax, 19 TPS di Jawa Tengah Harus Coblosan Ulang. Detiknew.com, 20 April 2019. Diakses dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4518247/gara-gara-hoaxs-19-tps-di-jawa-tengah-harus-coblos-ulang>
- Ramadan, Syahrul. (2019). 9 Juta Masyarakat Indonesia Terperdaya Hoax Momentum Pemilu 2019. JawaPos.com, 31 Maret 2019. Diakses dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/31/03/2019/9-juta-masyarakat-indonesia-terperdaya-hoax-momentum-pemilu-2019/>
- Salam, Aprinus. (2018). *The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Observing Ani-Diversity Memes since 2014*. Journal of Humaniora, Vol. 30, Number 3, October.
- Sumardi, Edi (Editor). 2019. Prof Hendri Subiakto Jelaskan Motif Penyebaran Hoang hingga Upaya Pemerintah untuk Membasmi. Tribun-Timur.com. Sabtu, 16 [153]

- Februari. Diakses dari <https://makasar.tribunnews.com/amp/2019/02/16/prof-hendri-subiakto-jelaskan-motif-penyebaran-hoax-hingga-upaya-pemerintah-untuk-membasmi>.
- Syafitrah, Adi. 2019. KPU Bantah Tuduhan Server Disetting untuk Menangkan. Diakses dari <https://turnbackhoax.id/2019/04/04/berita-kpu-bantah-tuduhan-server-disetting-untuk-menangkan-jokowi-57-dan-akan-lapor-bareskrim/>
- Utami, Pratiwi. (2018). *Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP), Volume 22, Issue 2, November: 85-97.
- Widyastuti, Ariyani Yakti. (2019). 3 Hari Usai Pemilu, Kementerian Kominfo Temukan 64 Hoax. *Bisnis.tempo.co*, 21 April 2019. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1197714/3-hari-urasi-pemilu-kementerian-kominfo-temukan-64-hoax>.

BIODATA PENULIS

Muhammad Mahsun, lahir di Ogan Komerling Ulu (Sumsel), 18 November 1985. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008), dan mendapatkan gelar Magister of Art dalam bidang Politik dan Pemerintahan di FISIPOL UGM (2013). Menjadi dosen di Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo dan mengajar mata kuliah Partai Politik, Perbandingan Politik dan Teori Politik. Beberapa penelitian terakhirnya adalah: “Urban Politics in Southeast Asia” yang dibiayai oleh Australian National University, Australia; “Women and Politics in 2019 Indonesian Election” dibiayai oleh PolGov FISIPOL UGM yang bekerjasama dengan Australian National University; “Politik Uang dan Dinamika Gerakan Petani Go Politik dalam Konsolidasi Demokrasi Lokal di Indonesia: Pengalaman Pilkada 2011 dan 2017 di Kabupaten Batang, Jawa Tengah” dibiayai oleh PolGov FISIPOL UGM yang bekerjasama dengan Australian National University; “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme di Pileg 2014” dibiayai oleh PolGov FISIPOL UGM dan Australian National Universty. Beberapa karya tulis yang dipublikasikan adalah: “Peasants and Politics: Achievements and Limits of Popular Agency in Batang, Central Java”, *Journal of Contemporary Southeast Asia*, Vol 39, No. 3, 2017; “Palembang, South Sumatera: Aspirasi Funds and Pork Barrel Politics” dalam Edward Aspinall and Mada Sukmajati (Editor). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press, 2016; “Kota

Palembang, Sumatera Selatan: Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme” dalam Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Editor), *POLITIK UANG DI INDONESIA: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov Press, 2015; *Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press, 2014; dan *Bisnis dan Politik di Aras Lokal: Arena Bagi Pemburuan Rente*, Jurnal Politika, Jurnal Pencerahan untuk Demokrasi, Vol. 7, NO. 2, Tahun 2012. Alamat email: muhammad.mahsun@walisongo.ac.id

Solkhah Mufrikhah, lahir di Kendal, 10 Mei 1985. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang 2008, dan pendidikan Magister Ilmu Politik pada kampus yang sama pada 2014. Menjadi dosen di Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo dan mengajar mata kuliah Pemilu, Analisis Kebijakan Publik, dan Politik Perkotaan. Selain sebagai dosen, saat ini, ia juga aktif sebagai Sekretaris Fatayat NU Jawa Tengah. Beberapa penelitian terakhirnya adalah: “Women and Politics in 2019 Indonesian Election” dibiayai oleh PolGov FISIPOL UGM yang bekerjasama dengan Australian National University; “Rizim Lokal dan Pelayanan Kebijakan Publik di Kota Pekalongan 2019” dibiayai oleh ANU Australia; “Politik Uang di Jawa Tengah” dibiayai oleh BOPTN UIN Walisongo 2017. Alamat email: solkhah.mufrikhah@walisongo.ac.id